

**ANALISIS RENCANA DAN REALISASI ANGGARAN
PADA KANTOR DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

Diajukan Oleh :

Suhartini

4517012085



SKRIPSI

**Untuk memenuhi salah satu persyaratan
Guna Memperoleh Gelar Sarjana EKONOMI**

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN KEUANGAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS BOSOWA
MAKASSAR
2021**

HALAMAN PENGESAHAN

Judul : Analisis Rencana dan Realisasi Anggaran pada Dinas
Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan

Nama Mahasiswa : Suhartini

Stambuk/NIM : 4517012085

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Program Studi : Manajemen Keuangan

Telah Disetujui:

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Muhlis Ruslan, SE., MSi


Syamsuddin Jafar, SE., MSi

Mengetahui dan Mengesahkan:

Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar

Sarjana Ekonomi pada Universitas Bosowa Makassar

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Ketua Program Studi

Universitas Bosowa

Ekonomi Manajemen


Dr. H. A. Arifuddin Mane, SE., MSi., SH., MH


Indrayani Nur, S.Pd SE., M.si

Tanggal Pengesahan

PERNYATAAN KEORSINILAN SKRIPSI

Nama : Suhartini
Nim : 4517012085
Jurusan : Manajemen Keuangan
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Judul : Analisis Rencana dan Realisasi Anggaran Pada Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa penulisan skripsi ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran, dan pemaparan asli dari saya adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik disuatu perguruan tinggi, dan tidak kecuali secara tertulis dikutip didalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan

Demikian pernyataan saya ini saya buat dalam keadaan sadar dan dapat tanpa paksaan sama sekali.

Makassar, Juli 2021



Suhartini

ABSTRAK

Suhartini.2021. *Analisis Rencana dan Realisasi Anggaran Pada Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan.* Skripsi. Dibimbing oleh Dr. Muhlis Ruslan, SE., MSi dan Syamsuddin Jafar, SE., MSi.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis anggaran Realisasi dan belanja pada Kantor Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan dan menganalisis perencanaan anggaran secara efektif dan efisien pada Dinas Provinsi Pendidikan Sulawesi Selatan.

Sumber data penelitian yaitu diperoleh dari wawancara langsung dan data sekunder berupa laporan perencanaan anggaran dan realisasi anggaran selama tiga tahun sejak terakhir sejak tahun 2018 sampai tahun 2020. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini berupa penelitian kepustakaan, penelitian lapangan, dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kuantitatif.

Hasil analisis penelitian menunjukkan bahwa tingkat efisiensi belanja Kantor Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2018-2020 dinyatakan kurang efisien. Hal ini terjadi karena adanya belanja yang realisasinya jauh sedikit dibandingkan dengan target dimana tingkat realisasi anggaran yang dimaksud adalah total dari belanja langsung dan belanja tidak langsung, maka peneliti harus berpatokan dalam hal biaya. Selanjutnya, tingkat efektivitas Realisasi Kantor Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan untuk Tahun Anggaran 2018 sebesar 1,139.6% yang berarti sangat efektif. Peningkatan anggaran yang cukup signifikan dibandingkan dengan tahun anggaran sebelumnya dikarenakan adanya belanja dari provinsi/kabupaten/kota, pemerintah daerah yang tidak dianggarkan ditahun sebelumnya. Dengan demikian akan akan disimpulkan bahwa jumlah belanja pada tahun 2018-2019 dinyatakan kurang efisien dan pada tahun 2020 dinyatakan efisien.

Kata kunci : Analisis Rencana, Realisasi, Anggaran Pendapatan dan Belanja

ABSTRACT

Suhartini. 2021. *Analysis of Budget Plans and Realization at the Education Office of South Sulawesi Province. Thesis. Supervised by Dr. Muhlis Ruslan, SE., MSi and Syamsuddin Jafar, SE., MSi.*

The aim of this study was to determine and analyze the income and expenditure budget at the Office of the Education Office of South Sulawesi Province and to analyze effective and efficient budget planning at the South Sulawesi Provincial Education Office.

The data source, namely research, was obtained from direct interviews and secondary data in the form of budget planning reports and budget realization for three years from 2018 to 2020. The data methods in this study were library research, field research, and documentation. The data analysis used in this research is descriptive analysis and quantitative.

The results of the research analysis show that the level of efficiency in spending at the South Sulawesi Provincial Education Office in 2018-2020 is declared less efficient. This happens because there are expenditures whose realization is far less than the target where the level of budget realization in question is the total of direct and indirect expenditures, so researchers must rely on costs. Furthermore, the income effectiveness level of the South Sulawesi Provincial Education Office for the 2018 Fiscal Year is 1,139.6%, which means it is very effective. A significant increase in the budget compared to the previous budget year was due to expenditures from provinces/districts/municipalities, local governments that were not budgeted for in the previous year. Thus, it can be concluded that the amount of spending in 2018-2019 was declared less efficient and in 2020 it was declared efficient.

Keywords: *Plan Analysis, Realization, Income Budget and Expenditure*

KATA PENGANTAR

Dengan Puji dan Syukur Alhamdulillah atas kehadiran Allah Yang Maha Kuasa karena atas Rahmat dan Hidayah-Nya peneliti ini akan terselesaikan tepat pada waktunya. Maksud dari skripsi ini, guna memenuhi salah satu persyaratan untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada Fakultas Ekonomi Jurusan Manajemen Universitas Bosowa Makassar, dengan judul “Analisis Rencana dan Realisasi Anggaran Pada Dinas Pendidikan Provinsi Selatan”

Penulis skripsi ini akan terselesaikan berkat bantuan baik berupa pikiran maupun petunjuk-petunjuk yang sangat berguna dari berbagai pihak. Atas bantuan dan bimbingan yang sangat berharga maka penulis menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada :

1. Pertama-tama, ucapan terima kasih penulis berikan kepada Rektor Universitas Bosowa Bapak Prof.Dr.Ir. Muhammad Salleh Pallu, M.Eng
2. Bapak Dr.H.A Arifuddin Mane, SE.,Msi., SH., MH selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bosowa
3. Ibu Dr.HJ. Herminawati Abu Bakar SE, MM Selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bosowa
4. Ibu Indrayani Nur, S.PD. SE., Msi selaku Ketua Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bosowa
5. Kepada Bapak DR. Muhlis Ruslan, SE., MS. i dan Bapak Syamsuddin Jafar, SE., MS.i sebagai dosen pembimbing atas waktu yang telah diluangkan untuk membimbing, memberi motivasi dan memberi bantuan literatur, serta diskusi-diskusi yang telah dilaksanakan dengan penulis

6. Seluruh Dosen Universitas Bosowa yang telah mendistribusikan ilmu dan Pendidikannya kepada penulis sehingga wawasan penulis bisa bertambah. Beserta seluruh Staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bosowa, terima kasih atas bantuannya dalam pengurusan Administrasi
7. Kepada Bapak Firdaus Topuriti, S.E., MM. sebagai Kepala Kasubag Umum Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan beserta stafnya, atas pemberian izin kepada peneliti untuk melakukan penelitian di instansi beliau.
8. Kepada Orang Tua, Petrus dan Meryy Yakub, yang selalu mendistribusikan kasih sayang, doa nasehat, serta atas kesabarannya yang luar biasa dalam setiap langkah hidup penulis, yang merupakan anugerah terbesar dalam hidup. Penulis berharap akan menjadi anak yang akan dibanggakan
9. Adik penulis tercinta Eko Sayuti terima kasih atas doa dan segala dukungannya
10. Sahabat saya Shakila Samuel A.Md A. B dan Veronika Sebo Linggi SKM serta teman-teman yang terdekat selalu mendistribusikan dukungan moral dan motivasi untuk selalu semangat dalam penyusunan skripsi ini

Skripsi ini masih jauh dari sempurna. Apabila terdapat kesalahan-kesalahan dalam skripsi ini, sepenuhnya menjadi tanggungjawab peneliti dan bukan para pemberi bantuan. Kritik dan saran konstruktif yang membangun akan lebih menyempurnakan skripsi ini. Semoga kebaikan yang telah diberikan oleh semua pihak menakankan pahala di sisi Allah SWT, Amin ya rabbal alamin

Makassar, Juli 2021

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN KEORISINILAN SKRIPSI	iii
ABSTRAK	iv
ABSTRACT	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.4 Manfaat Penelitian	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Kerangka Teori	5
2.1.1 Pengertian Anggaran	5
2.1.2 Ciri-Ciri Anggaran	8
2.1.3 Fungsi Anggaran	10
2.1.4 Tujuan Penyusunan Anggaran	12
2.1.5 Jenis-Jenis Anggaran	14
2.1.6 Manfaat Anggaran	17

2.1.7	Keunggula dan Kelemahan Anggaran	20
2.1.8	Alokasi Anggaran Pada Pendidikan	21
2.1.9	Rincian Pendapatan dan Belanja Sektor Pendidikan	23
2.1.10	Rencana	25
2.1.11	Anggaran Sebagai Alat Penyusunan	29
2.1.12	Hubungan Penyusunan dengan Anggaran	32
2.1.13	Rencana Anggaran	32
2.1.14	Laporan Realisasi Anggaran (LRA).....	35
2.2	Kerangka Pikir	40
2.3	Hipotesis	42
BAB III METODE PENELITIAN		
3.1	Lokasi dan Waktu Penelitian	43
3.2	Jenis dan Sumber Data	43
3.3	Metode Pengumpulan Data	44
3.4	Metode Analisis	45
3.5	Definisi Operasional	47
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN		
4.1	Gambaran Instansi Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan Makassar	49
4.1.1	Sejarah Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan Makassar	49
4.1.2	Visi dan Misi Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan	51
4.1.3	Struktur Organisasi	52

4.1.4	Uraian Tugas Personil Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan Makassar	54
4.2	Deskriptif Data	57
4.2.1	Analisis Efisiensi	59
4.2.2	Analisis Efektivitas	61
4.3	Pembahasan	63
4.3.1	Realisasi	63
4.3.2	Belanja.....	64
4.3.3	Tingkat Efisiensi	66
4.3.4	Tingkat Efektivitas.....	66
BAB V PENUTUP		
5.1	Kesimpulan	67
5.2	Saran	68
DAFTAR PUSTAKA		69

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Kriteria Efisiensi.....	27
Tabel 4.1 Daftar Realisasi Dan Anggaran Pertahun Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan 2018-2020	48
Tabel 4.2 Kesimpulan Analisis Realisasi dan Anggaran	49
Tabel 4.3 Ringkasan Perhitungan Realisasi Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2018-2020	50
Tabel 4.4 Ringkasan Perhitungan Realisasi Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2018-2020	51

UNIVERSITAS

BOSOWA

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pikir.....30



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada masa ini, pendidikan merupakan hal yang penting untuk mencerdaskan anak-anak bangsa. Dinas Pendidikan Sulawesi Selatan merupakan instansi pemerintah yang mendistribusikan layanan untuk masyarakat, dalam menumbuhkan suatu strategi dalam mengelola aspek keuangan Negara. Anggaran belanja merupakan salah satu strategi yang akan digunakan dan dengan mudah merencanakan pengalokasian anggaran yang di butuhkan dan hingga akan langsung melakukan pengendalian keuangan serta akan menjadi alat pengendalian untuk penggunaan anggarannya yang apabila terjadi perbedaan antara anggaran belanja dengan pengaktualannya sehingga akan dijadikan sebagai bahan evaluasi dan acuan untuk penyusunan dana pada tahun berikutnya.

Pengelolaan keuangan Dinas Pendidikan sangat penting, agar anggaran untuk membiayai semua kebutuhan dan pelaksanaan program dapat sesuai dengan anggaran.. Semua rencana memerlukan dana untuk mendukung rencana tersebut, sehingga pengeluaran harus dialokasikan dengan tepat untuk mengembangkan anggaran yang memenuhi kebutuhan tersebut.

Sebuah rencana yang baik menghasilkan akan laporan yang tidak diragukan lagi dan hasilnya lebih akurat. Oleh karena itu, dalam hal ini juga pemerintah yang akan menjadi terdepan dalam memberikan pelayanan penuh kepada masyarakat dan untuk mencapai pembangunan yang diperlukan untuk transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan. Pernyataan agar

pemerintahan yang bebas dapat tercipta. Korupsi dan pencurian. Rencana kerja memuat rencana anggaran serta tujuan kerja. Rencana dan rencana kegiatan serta anggaran yang telah ditetapkan diharapkan dapat mendorong perkembangan dinas pendidikan Dinas Pendidikan. Menurut Hasibuan (2007:49), rencana terdiri dari serangkaian keputusan yang menjadi pedoman untuk mencapai tujuan tertentu.

Tahapan dalam penyusunan dana merupakan tahapan rencana kerja pada jangka pendek, untuk penentuan total alokasi dana pada setiap program aktivitas. Anggaran harus digunakan dengan sebaik mungkin untuk mengurangi pemborosan dana serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas, dan harus memerhatikan rasa keadilan dan kepatuhan, yang merupakan tuntutan dari fungsi alokasi. Tahap anggaran ini menjadi sangat penting karena anggaran yang tidak efektif dan tidak berorientasi pada kinerja akan akan menggagalkan penyusunan yang telah disusun.

Penyusunan Anggaran Pemerintah juga ditetapkan dalam peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 sebagaimana diatur melalui Peraturan Pemerintah menjelaskan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD) adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disepakati secara bersama oleh pemerintah Daerah dan DPRD dan ditentukan melalui Peraturan Daerah. Upaya kongrit dari pemerintah yaitu dengan menyediakan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang disusun berdasarkan peraturan pemerintah melalui Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010 standar Akutansi Pemerintah (SAP). Ketentuan ini dijadikan referensi pemerintah pusat dan daerah untuk menghasikan data yang akurat.

Realisasi laporan anggaran dibuat untuk mempertanggungjawabkan hasil penyusunan dana/anggaran. Laporan ini memuat analisis perbandingan antara berbagai anggaran dan realisasi pada satu periode untuk mengetahui penyebab terjadinya penyimpangan. Adanya penggunaan Laporan realisasi anggaran akan dilaksanakan penilaian tentang sukses atau gagalnya suatu kinerja organisasi dalam sektor publik dalam menjalankan kegiatan yang dilaksanakan pada waktu yang bersangkutan. Maka dari itu, hal ini bisa dijadikan evaluasi untuk perbaikan di masa yang akan mendatang.

Dari pemaparan diatas, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi akuntabilitas laporan keuangan pada dinas Pendidikan berkaitan dengan perencanaan dan penyusunan laporan dan realisasi anggaran pada periode sebelumnya. Terkait dengan masalah tersebut maka peneliti melaksanakan penelitian dengan judul **“ANALISIS RENCANA DAN REALISASI ANGGARAN PADA KANTOR DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SULAWESI SELATAN**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan pembahasan pada latar belakang, peneliti memformulasikan rumusan masalah yaitu “apakah Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan telah menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja secara efektif dan efisiensi”

1.3 Tujuan Penelitian

1. Menganalisa anggaran pendapatan dan belanja pada Kantor Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan
2. Untuk mengetahui dan menganalisis penyusunan anggaran secara efektif dan efisien pada Dinas Pendidikan Sulawesi Selatan.

1.4 Manfaat Penelitian

1 Manfaat Teoritis

Hasil analisis dan temuan dapat dijadikan manfaat teori. Penyusunan anggaran dan realisasi sebagai variabel dengan beberapa teori dan objek kajian yang berbeda.

2 Manfaat Praktis

Hasil analisis dan temuan ini diharapkan dapat dijadikan bahan rujukan bagi instansi terkait sehingga dapat direvisi dan disempurnakan isi yang terkandung didalam skripsi ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kerangka Teori

2.1.1 Pengertian anggaran

Dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBII) menjelaskan bahwa pengertian anggaran adalah sebagai berikut :

1. Perkiraan, perhitungan
2. Aturan
3. *Ek*, taksiran mengenai penerima dan pengeluaran kas yang diharapkan untuk periode yang akan datang
4. *Man*, rencana penjabatan sumber daya yang dinyatakan dengan angka, biasanya dalam satuan uang

Anggaran atau yang biasa disebut (*budget*) berasal dari bahasa perancis "*bougette*" yang artinya tas kecil merupakan alat penyusunan, pedoman, pengendalian dan alat pengawasan dibidang keuangan yang di gunakan oleh perusahaan yang berorientasi pada laba maupun non – laba. Dengan menggunakan anggaran maka perkembangan perusahaan/instansi akan akan dipelajari dengan teliti dan berkesenambungan, anggaran akan berjalan dengan baik apabila dalam organisasi perusahaan/instansi tersebut ada dukungan aktif, baik dari pelaksana tingkat atas maupun tingkat bawah. Anggaran sebagai suatu sistem, nampaknya cukup memadai untuk dipergunakan sebagai alat perencanaan, koordinasi dan pengendalian dari seluruh kegiatan suatu organisasi. Dengan adanya anggaran, suatu organisasi akan dapat menyusun perencanaan dengan

lebih baik sehingga koordinasi dan pengendalian yang dilakukan dapat memadai pula. Dengan demikian dari gambaran tersebut dapat terasa pentingnya suatu perencanaan dan pengawasan yang baik hanya dapat diperoleh manajemen dengan mempelajari, menganalisa dan mempertimbangkan dengan seksama kemungkinan-kemungkinan, alternatif-alternatif dan konsekuensi yang ada.

Adapun beberapa pengertian berkaitan dengan anggaran, diantaranya :

Terdapat beberapa pengertian dana, diantaranya :

- a. Menurut (Mardiasmo 2009) “Anggaran adalah pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak di capai dalam periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial”
- b. Menurut (Sugijanto 1995 : 22) “Anggaran adalah rencana kegiatan yang di ciptakan dalam bentuk finansial, meliputi usulan pengeluaran yang diperkirakan dalam suatu periode waktu, serta usulan cara-cara memenuhi pengeluaran tersebut”
- c. Menurut (Munandar 2011)“Suatu rencana yang disusun dengan sistematis yang meliputi semua aktivitas perusahaan yang dinyatakan dalam unit atau kesatuan moneter yang berlaku untuk jangka waktu tertentu”

Dari ketiga defenisi di atas, maka akan disimpulkan bahwa defenisi anggaran adalah dokumen yang berisi estimasi, kinerja, baik berupa penerimaan dan pengeluaran, dan disajikan dalam satuan moneter yang akan dicapai pada periode waktu tertentu dan menyertakan data masa lalu sebagai bentuk penilaian dan pengendalian.

“Menurut Robert Anthony dan Vijay Govindarajan (2002) . Anggaran merupakan alat utama dalam penyusunan jangka pendek yang efektif dan pengendalian dalam organisasi. Sebuah anggaran dilaksanakan biasanya dalam satu tahun dan menyatakan rencana Realisasi anggaran untuk tahun yang bersangkutan”. anggaran mempunyai karakteristik sebagai berikut :

- a. Anggaran memperkirakan keuntungan yang potensial dari perusahaan,
- b. Biasanya meliputi waktu selama satu tahun
- c. Sekali di setuju, anggaran hanya akan di ubah dalam situasi tertentu
- d. Dinyatakan dalam istilah moneter, meskipun total moneter didukung dengan jumlah non-moneter,
- e. Usulan anggaran disetujui dan diperiksa oleh pejabat yang lebih tinggi dari pembuat dana,
- f. Secara berkala kinerja keuangan aktual dibanding dengan dana dan perbedaannya dianalisis dan dijelaskan

Menurut Munandar (2010 : 1) suatu anggaran mempunyai empat unsur yaitu :

- a. Rencana, merupakan suatu penentuan terlebih dahulu tentang aktivitas atau kegiatan yang akan dilakukan di waktu yang akan datang. Anggaran juga merupakan suatu rencana, karena anggaran merupakan penentuan terlebih dahulu tentang kegiatan-kegiatan perusahaan di waktu yang akan datang. Hanya saja anggaran merupakan suatu rencana yang mempunyai spesifikasi-spesifikasi khusus, seperti misalnya disusun secara sistematis, mencakup seluruh kegiatan pemerintah, dinyatakan dalam unit moneter.

- b. Meliputi seluruh kegiatan perusahaan, mencakup semua kegiatan yang akan dilakukan oleh semua bagian-bagian yang ada dalam perusahaan.

Mengingat bahwa anggaran adalah suatu rencana yang nantinya akan dijadikan sebagai pedoman kerja, maka sudah semestinya bahwa anggaran harus mencakup seluruh kegiatan .

- c. Dinyatakan dalam unit moneter, yaitu unit (kesatuan) yang dapat diterapkan pada berbagai kegiatan perusahaan yang beraneka ragam. Adapun unit moneter yang berlaku di Indonesia ialah unit “Rupiah”. Unit moneter ini sangat diperlukan, mengingat bahwa masing-masing kegiatan perusahaan yang beraneka ragam tersebut sering mempunyai kesatuan unit yang berbeda-beda, seperti kilogram, meter, meter persegi, liter dan sebagainya. Dengan unit moneter dapatlah diseragamkan semua kesatuan yang berbeda tersebut, sehingga memungkinkan untuk dijumlahkan, diperbandingkan serta dianalisa lebih lanjut.
- d. Jangka waktu tertentu yang akan datang, yang menunjukkan bahwa anggaran berlakunya untuk masa yang akan datang. Ini berarti bahwa apa yang dimuat didalam anggaran adalah taksiran-taksiran tentang apa yang akan terjadi serta apa yang akan dilakukan di waktu yang akan datang.

2.1.2 Ciri-Ciri Anggaran

Ciri-ciri anggaran menurut Rudianto (2009) adalah sebagai berikut :

- a. Dinyatakan dalam satuan moneter. Penulisan dalam satuan moneter tersebut dapat juga didukung oleh satuan kuantitatif lain, misalnya unit. Penyusunan rencana kerja dalam satuan moneter, bertujuan untuk mempermudah membaca

atau memahaminya. Karena itu, sebaiknya anggaran disusun dalam bentuk kuantitatif moneter yang ringkas.

- b. Umumnya mencakup kurun waktu satu tahun. Bukan berarti anggaran tidak dapat disusun untuk kurun waktu lebih pendek, tiga bulanan misalnya, atau kurun waktu lebih panjang, seperti lima tahunan. Batasan waktu di dalam penyusunan anggaran akan berfungsi untuk memberikan batasan rencana kerja tersebut.
- c. Mendukung komitmen manajemen. Anggaran harus disertai dengan upaya pihak manajemen dan seluruh anggota organisasi untuk mencapai apa yang telah ditetapkan. Tanpa upaya serius dari pihak manajemen untuk mencapainya, maka penyusunan anggaran tidak akan banyak manfaatnya bagi perusahaan. Karena itu, didalam menyusun anggaran, pemerintah harus mempertimbangkan dengan teliti sumber daya yang dimiliki pemerintah untuk menjamin bahwa anggaran yang disusun adalah realistis.
- d. Usulan anggaran disetujui oleh pejabat yang lebih tinggi dari pelaksana anggaran. Anggaran tidak dapat disusun sendiri-sendiri oleh setiap bagian organisasi tanpa persetujuan dari atasan pihak manajemen.
- e. Setelah disetujui, anggaran hanya dapat diubah jika ada keadaan khusus. Jadi, tidak setiap saat dan dalam segala keadaan anggaran boleh diubah oleh manajemen. Anggaran boleh diubah jika situasi internal dan eksternal organisasi memaksa untuk mengubah anggaran tersebut. Perubahan asumsi internal dan eksternal memaksa untuk mengubah anggaran karena jika

dipertahankan akan membuat anggaran tidak relevan lagi dengan situasi yang ada.

- f. Harus dianalisis penyebabnya, jika terjadi selisih anggaran di dalam pelaksanaannya. Karena tanpa ada analisis yang lebih mendalam tentang selisih anggaran tersebut, maka potensi untuk terulang lagi di masa mendatang menjadi besar. Tujuan analisis selisih anggaran tersebut adalah untuk mencari penyebab selisih anggaran, agar tidak terulang lagi di masa mendatang dan agar penyusunan anggaran di kemudian hari menjadi lebih relevan dengan situasi yang ada

Selain itu suatu instansi yang sehat yaitu salah satu organisasi yang memberi tugas fungsional dengan jelas dan menentukan garis wewenang dan tanggung jawab yang tegas, adanya sistem akuntansi yang memadai seperti penggolongan suatu rekening yang sama antara anggaran dan realisasi anggaran pencatatan akuntansi untuk memberikan informasi mengenai realisasi laporan yang didasarkan pada akuntansi pertanggungjawaban adanya suatu penilaian dan analisis diperlukan untuk menetapkan alat pengukur prestasi, sehingga anggaran dapat dipakai untuk menganalisa prestasi adanya dukungan dari para pelaksana anggaran dapat dipakai sebagai alat yang baik bagi manajemen jika ada dukungan aktif para pelaksana

2.1.3 Fungsi Anggaran

Anggaran sangat diperlukan dalam suatu instansi, maka dari itu berikut beberapa fungsi anggaran. Menurut Deddi Nordiawan (2004:48) beberapa fungsi anggaran dalam sektor publik adalah sebagai berikut :

1. Anggaran sebagai alat penyusunan (*planning*)

Dengan adanya anggaran, organisasi tahu apa yang harus dilaksanakan dan kearah mana kebijakan yang harus dibuat

2. Anggaran sebagai alat pengendalian (*controlling*)

Dengan adanya anggaran organisasi sektor publik akan menghindari adanya pengeluaran yang terlalu besar (*overspending*) atau adanya penggunaan dana yang tidak semestinya

3. Anggaran sebagai alat kebijakan

Melalui anggaran sektor publik maka akan menentukan arah kas kebijakan tertentu

4. Anggaran sebagai alat politik

Dalam organisasi sektor publik, melalui anggaran akan dilihat komite pengelola dalam melaksanakan program-program yang telah dijanjikan

5. Anggaran sebagai alat kordinator dan komunikasi

Melalui dokumen anggaran yang kompresif sebuah utukan atau unit kerja atau departemen yang merupakan sub organisasi akan mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh utukan/unit kerja lainnya

Sementara itu, *National Commiitte on Governmental Accounting* (NCGA) yang dikutip oleh Tendi Haruman (2010:11) menjelaskan bahwa fungsi anggaran dalam sektor publik adalah sebagai berikut :

1. Anggaran merupakan hasil akhir dari proses penyusunan rencana kerja
2. Anggaran merupakan cetak biru aktivitas yang akan dilaksanakan dimasa mendatang

3. Anggaran sebagai alat komunikasi interen yang menghubungkan berbagai unit kerja dan mekanisme kerja antara atasan dan bawahan
4. Anggaran sebagai alat pengendali unit kerja
5. Anggaran merupakan alat motivasi dan sesuai tindakan efektif dan efisien dalam mencapai visi organisasi
6. Anggaran merupakan instrumen politik
7. Anggaran merupakan instrumen kebijakan fiskal

2.1.4 Tujuan Penyusunan Anggaran

(Hansen & Mowen,1997:352) : Tujuan Anggaran untuk pemerintah :

- a. Memaksa manajer untuk membuat rencana.
- b. Memberikan informasi sumber daya yang dapat meningkatkan kualitas pengambilan keputusan
- c. Sebagai standar bagi evaluasi kinerja.
- d. Meningkatkan komunikasi dan koordinasi.

Menurut Darise (2014:12) penyusunan anggaran adalah proses pengdana daerah yang secara konseptual terdiri atas formulasi kebijakan dana dan penyusunan operasional dana. Menurut Muhammad (2013:32) penyusunan anggaran didasarkan pada rencana kerja pemerintah daerah untuk mewujudkan layanan kepada masyarakat dalam mencapai cita-cita Negara.

Menurut Prawironegoro dan Purwanti (2008), anggaran bertujuan untuk:

1. Memaksa pimpinan untuk membuat rencana kerja. pimpinan harus selalu berpikir proaktif tentang perubahan yang akan terjadi di masa depan. Kemampuan memprediksi masa depan itu dituangkan dalam

bentuk angka angka satuan fisik dan satuan uang yang berorientasi pada kelangsungan hidup perusahaan.

2. Tolak ukur untuk mengevaluasi kinerja. Kinerja manajemen harus dibandingkan dengan anggaran. Hasilnya adalah varian; varian dihitung dan dianalisis untuk koreksi rencana, anggaran dan pelaksanaan kerja.
3. Meningkatkan komunikasi dan koordinasi antar pimpinan. Secara formal anggaran mengkomunikasikan rencana organisasi kepada semua level manajemen. Selanjutnya manajer mengadakan koordinasi untuk merealisasikan rencana tersebut.
4. Membantu pengambilan keputusan. Anggaran mengarahkan perhatian untuk mengambil keputusan.

Tujuan penyusunan anggaran menurut Nafarin (2013: 19) antara lain adalah sebagai berikut :

- a. Digunakan sebagai landasan yuridis formal dalam memilih sumber dan investasi anggaran
- b. Mengadakan pembatasan total anggaran yang akan dicari dan digunakan
- c. Merasionalkan sumber dan investasi dana agar akan mencapai hasil yang maksimal
- d. Menyempurnakan rencana yang telah disusun karena dengan anggaran menjadi lebih jelas dan nyata terlihat

Penyusunan anggaran menurut Mardiasmo (2002:63) adalah sebagai berikut :

1. Membantu pemerintah mencapai tujuan finansial dan meningkatkan koordinasi antar unit dalam lingkungan pemerintah
2. Membantu menciptakan pencapaian efisiensi dan keadilan dalam menyediakan barang dan jasa publik melalui proses pemrioritasan
3. Memungkinkan untuk pemerintah untuk memenuhi prioritas belanja
4. Meningkatkan transparansi dan pertanggungjawaban pemerintah

Dalam proses penyusunan anggaran tidak lepas faktor-faktor penyusunan anggaran menurut Mardiasno (2011:61) menjelaskan faktor dominan dalam proses penyusunan anggaran adalah sebagai berikut :

- a. Tujuan dan target yang hendak dicapai,
- b. Ketersediaan sumber daya
- c. Waktu yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan dan target
- d. Faktor lainnya dengan munculnya peraturan pemerintah yang baru, fluktuasi pasar, perubahan sosial politik, bencana alam dan lain sebagainya.

2.1.5 Jenis-jenis Anggaran

Anggaran yang harus disusun pemerintah terdiri dari berbagai jenis dana, aktivitas yang telah direncanakan dalam satu periode harus dilaksanakan penyusunan dana yang lengkap, karena tanpa memiliki anggaran yang lengkap, maka aktivitas yang akan dilaksanakan tetapi tidak memiliki dana tersebut tetap diupayakan dilaksanakan, maka aktivitas tersebut tidak akan dinilai hasilnya atau dengan kata lain kegiatan tersebut tidak efektif dan efisien

Menurut Nafarin (2013:31) berpenakan bahwa anggaran dikelompokkan menjadi beberapa untukan sudut pandang sebagai berikut :

1. Dilihat dari segi dasar penyusunan, anggaran terdiri dari :
 - a. anggaran variable (*variable budget*), yaitu anggaran yang disusun berdasarkan interval (kisar) kapasitas (aktivitas) tertentu dan pada intinya merupakan suatu seri anggaran yang akan disesuaikan pada tingkat aktivitas (kegiatan) yang berbeda.
 - b. Anggaran tetap (*fixed budget*), yaitu anggaran yang disusun berdasarkan suatu tingkat kapasitas tertentu
2. Dilihat dari segi penyusunan, dana terdiri dari
 - a. Anggaran priodik (*periodic budget*) adalah anggaran yang disusun untuk satu periode tertentu. Pada umumnya periodenya satu tahun yang disusun setiap akhir periode anggaran.
 - b. Anggaran kontinu (*continuous budget*) adalah anggaran yang dibuat untuk mengadakan perbaikan sehingga anggaran yang dibuat dalam setahun mengalami perubahan
3. Dilihat dari segi jangka waktu, dana terdiri dari :
 - a. Anggaran jangka pendek (*short-range budget*) adalah anggaran yang dibuat dengan jangka waktu lebih dari satu tahun. Anggaran jangka panjang tidak mesti dalam berupa dana modal. Anggaran jangka panjang diperlukan sebagai dasar penyusunan anggaran jangka pendek

b. Anggaran jangka panjang (*long-range budget*) adalah anggaran yang dibuat dengan jangka waktu lebih dari satu tahun. Anggaran jangka panjang tidak mesti berupa anggaran modal. Anggaran jangka panjang diperlukan sebagai dasar penyusunan

4. Dilihat dari segi bidangnya, anggaran terdiri dari anggaran operasional dan anggaran keuangan. Kedua anggaran ini bila dipadukan disebut anggaran induk (*master budget*)

a. Anggaran operasional (*operational budget*) adalah anggaran untuk menyusun anggaran laba rugi

b. Anggaran keuangan (*financial budget*) adalah dana untuk menyusun dana neraca, dana keuangan terdiri dari

1. Dana kas
2. Dana piutang
3. Dana persediaan
4. Dana utang
5. Dana neraca

5. Dilihat dari segi kemampuan menyusun anggaran terdiri dari

a. Anggaran komprehensif (*comprehensive budget*) adalah rangkaian dari berbagai jenis anggaran yang disusun secara lengkap. Anggaran ini merupakan perbandingan dari dana operasional dan dana keuangan yang disusun secara lengkap

- b. Anggaran parsial (*partially budget*) adalah anggaran yang disusun secara tidak lengkap atau dana yang hanya menyusun utukan dana tertentu saja

6. Dilihat dari segi fungsinya, dana terdiri dari :

- a. Anggaran tertentu (*appropriation budget*) adalah dana yang diperuntukan untuk tujuan tertentu dan tidak boleh digunakan untuk manfaat lain
- b. Anggaran kinerja (*performance budget*)

Adalah dana yang disusun berdasarkan fungsi kegiatan yang dilaksanakan dalam organisasi (perusahaab/instansi), misalnya untuk menilai apakah biaya (beban) yang dikeluarkan oleh masing-masing aktivitas tidak melampui batas

2.1.6 Manfaat Anggaran

Anggaran merupakan hal yang sangat penting untuk sebuah organisasi ataupun instansi, agar berjalannya kegiatan maka kita membutuhkan anggaran dana untuk mengetahui apa-apa saja yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan. Anggaran memiliki banyak manfaat untuk sebuah instansi agar memotivasikan para pegawai, bertumbuhnya rasa tanggung jawab kepada para pegawai, anggaran juga bisa dipakai sebagai alat menilai kekurangan dan kelebihan pegawai. Semua bentuk kegiatan bisa diarahkan dengan suatu tujuan yang sudah ditetapkan dan untuk alat pendidikan para pimpinan bisa memperbaiki sumber daya seperti peralatan, tenaga kerja, dan dana yang bisa dimanfaatkan seefisien mungkin juga dapat menghindari dari pemborosan dan pembayaran yang tidak penting

menghubungkan suatu kegiatan dengan trend yang ada di instansi pemerintah dan dapat membantu menunjang suatu kebijaksanaan suatu instansi memerintahkan semua tenaga kerja di suatu instansi untuk dapat menentukan arah atau kegiatan yang sangat menguntungkan mengawasi suatu kegiatan pemerintah Adanya suatu perencanaan yang terpadu dalam pekerjaan pemerintah menentukan suatu tujuan membantu dalam menunjang kebijakan suatu pemerintah membantu untuk koordinasi faktor manusia dengan pemerintah.

Menurut Mulyadi (2010 : 502), fungsi anggaran terdiri dari enam item yaitu :

- a. Anggaran merupakan hasil akhir dari proses rencana kerja
- b. Anggaran merupakan cetak biru aktifitas yang akan dilaksanakan dimasa yang akan datang.
- c. Anggaran berfungsi sebagai alat komunikasi intern yang berhubungan yang menghubungkan berbagai unit organisasi dalam instansi dan yang menghubungkan atasan dan bawahan.
- d. Anggaran berfungsi sebagai alat tolak ukur yang dipakai sebagai pembanding hasil operasi sesungguhnya.
- e. Anggaran berfungsi sebagai alat pengendalian yang memungkinkan manajemen menunjuk bidang yang kuat dan lemah bagi pemerintah.
- f. Anggaran berfungsi sebagai alat untuk mempengaruhi dan memotivasi pimpinan dan karyawan agar senantiasa bertindak secara efektif dan efisien sesuai dengan tujuan organisasi.

Menurut Rudianto (2009), anggaran memiliki beberapa manfaat yang saling terkait dan terintegrasi satu dengan lainnya, diantaranya:

a. Fungsi perencanaan

- 1) Memberikan pendekatan yang terarah dan terintegrasi kepada seluruh anggota organisasi.
- 2) Menciptakan suasana organisasi yang mengarah kepada tujuan umum.
- 3) Mendorong seluruh anggota organisasi untuk memiliki komitmen mencapai sasaran yang telah ditetapkan.
- 4) Mengarahkan penggunaan seluruh sumber daya pada kegiatan yang paling menguntungkan.
- 5) Mendorong pencapaian standar prestasi yang tinggi bagi seluruh anggota organisasi.

b. Fungsi pengendalian Berperan sebagai tolok ukur atau standar bagi kegiatan organisasi.

- 1) Memberikan kesempatan untuk menilai dan mengevaluasi secara sistematis setiap segi atau setiap aspek organisasi.
- 2) Mendorong pihak pimpinan secara dini mengadakan penelaahan terhadap masalah yang dihadapi.

Supriyono (2000) menyatakan bahwa anggaran mempunyai tiga kegunaan pokok sebagai berikut :

- a. Sebagai pedoman kerja. Anggaran berfungsi sebagai pedoman kerja dan memberikan target-target yang harus dicapai oleh kegiatan-kegiatan pemerintah di waktu yang akan datang.

- b. Sebagai alat pengkoordinasian kerja. Anggaran berfungsi alat pengkoordinasian kerja agar semua bagian-bagian yang terdapat di dalam dan saling menunjang, saling bekerja sama dengan baik, untuk menuju ke sasaran yang telah ditetapkan.
- c. Sebagai alat pengawasan kerja. Anggaran berfungsi sebagai tolak ukur, sebagai alat pembanding untuk menilai (evaluasi) realisasi kegiatan nanti.

2.1.7 Keunggulan dan Kelemahan anggaran

Menurut Prawironegoro dan Purwanti (2008), anggaran memiliki keunggulan dan kelemahan antara lain sebagai berikut :

- a. Keunggulan anggaran
 - 1) Hasil analisis lingkungan internal pemerintah yaitu analisis data historis yang menjelaskan kekuatan dan kelemahannya kemudian dijadikan bahan baku untuk membuat program kerja di masa mendatang.
 - 2) Hasil analisis lingkungan eksternal yang menjelaskan peluang bisnis dan kendala yang dihadapinya, kemudian dijadikan bahan baku untuk membuat program kerja di masa mendatang.
 - 3) Sebagai alat pedoman kerja dan pengendalian kegiatan operasional dan keuangan.
 - 4) Sebagai sarana koordinasi antar seksi, bagian, divisi dalam suatu instansi.
 - 5) Sebagai sumber rasa tanggung jawab dan partisipasi aktif semua kepala seksi, bagian, divisi dalam suatu instansi.

- 6) Sebagai dasar untuk mengetahui wewenang dan tanggung jawab semua *level* manajer.

b. Kelemahan Anggaran

- 1) Prediksi kegiatan bisnis di masa mendatang belum tentu tepat atau belum tentu mendekati kenyataan.
- 2) Perubahan kondisi politik, sosial, ekonomi, bisnis di masa mendatang sulit diprediksi sehingga sering tidak terjangkau dalam pemikiran pembuatan anggaran.
- 3) Sering terjadi konflik kepentingan dalam penyusunan anggaran maupun dalam pelaksanaannya.
- 4) Pembuat anggaran (kepala seksi, bagian, divisi) sering berpikir subjektif, mementingkan seksinya, bagiannya atau divisinya saja.
- 5) Anggaran pada umumnya sangat idealistik sehingga sulit dicapai dan dapat mengakibatkan para pelaksana frustrasi.

2.1.8 Alokasi Anggaran pada Pendidikan

Menurut Bastian (2009) anggaran pendidikan akan diinterpretasikan sebagai pernyataan menyangkut perkiraan penerimaan dan pengeluaran yang diharapkan dalam satu periode. Menurut Ikshan dan Anisykurillah (2010) pengelolaan anggaran pendidikan yang baik harus dilaksanakan dengan penyusunan, perorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian, pengawasan, penilaian, pelaporan dan penentuan dana

Seberapa besar komitmen pemerintah dalam pembangunan pendidikan diantara lainnya tercermin dari dana pendidikan yang disediakan Anggaran

Realisasi dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Besarnya dana pendidikan seperti yang yang telah ditentukan dalam Peraturan Pemerintah amandemen Pasal 31 UUD 1945 adalah sebagai berikut :

1. Setiap warga negara berhak menamatkan pendidikan
2. Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayai
3. Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keamanan dan ketakwaan serta ahklak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang.
4. Negara memprioritaskan dana pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari dana Realisasi dan belanja negara serta dari dana Realisasi dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan

Dipertegaskan dalam Peraturan Pemerintah Pasal 49 UU No. 20 Tahun 2003 bahwa dana pendidikan selain gaji pendidikan dan biaya pendidikan kedinasan di alokasikan 20% dari anggaran pendapatan dan belanja Negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Oleh karena itu secara sederhana, makin besar penerimaan negara dan daerah makin besar alokasi dana untuk sektor pendidikan

Anggaran pendidikan melalui belanja pemerintah pusat merupakan alokasi dana pendidikan yang dianggarkan melalui kementerian negara/lembaga,

anggaran pendidikan melalui transfer ke daerah merupakan alokasi dana pendidikan yang disalurkan melalui transfer ke daerah dalam rangka pelaksanaan ekonomi daerah. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah pasal 38 Tahun 2007 tentang Pemuntukan Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota pendidikan merupakan salah satu urusan wajib daerah. Anggaran pendidikan dialokasikan melalui transfer ke daerah tersebut terdiri dari berbagai pembentukan, tata susunan (nomenklatur).

Kebijakan Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang pendidikan mulai digulir pada Tahun 2003 Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.544/KMK07/2002 Tanggal 31 Desember 2002 tentang alokasi khusus Tahun dana 2003, penggunaan DAK bidang pendidikan diarahkan untuk menunjang pelaksanaan wajib

2.1.9 Rincian pendapatan dan belanja sektor Pendidikan

Menurut UUD Pasal 31 ayat 4 mengatitkan pengalokasian anggaran pendidikan, baik alokasi melalui investasi anggaran pemerintah Pusat yaitu anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Anggaran Realisasi dan belanja daerah (APBD) adalah suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditentukan berdasarkan peraturan daerah masing-masing yang menyangkut tentang anggaran dan pendapatan belanja. Anggaran pendapatan dan belanja daerah adalah rencana

keuangan tahunan pemerintah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah pusat menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 1 ayat 7

Menurut Muliza (2017) anggaran belanja pendidikan adalah jenis belanja daerah yang dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota dalam bidang pendidikan

Menurut PMK No. 84/PMK.07/2009, alokasi belanja fungsi pendidikan ditentukan sekurang-kurangnya 20% untuk dialokasikan pada jenis-jenis belanja yang meliputi :

1. Belanja modal, yang meliputi belanja pengadaan lahan dan bangunan untuk sarana dan prasarana pendidikan, dan belanja pengadaan asset kependidikan lainnya yang mendistribusikan manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi
2. Belanja barang, yang meliputi belanja barang dan jasa, belanja pemeliharaan, dan belanja perjalanan
3. Belanja pegawai, yang meliputi gaji pokok, tunjangan yang melekat pada gaji, tunjangan struktural untuk pejabat struktural, tunjangan fungsional untuk pejabat fungsional atau subsidi tunjangan fungsional untuk guru
4. Bantuan sosial, merupakan pemberian bantuan yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif dalam bentuk uang/barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat

5. Bantuan keuangan, merupakan pemberian kepada daerah lain dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan

Belanja hibah, merupakan pemberian uang/barang atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, masyarakat dan oerganisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditentukan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak terus-menerus

2.1.10 Rencana

Sebuah rencana anggaran adalah rencana untuk pendapatan dan pengeluaran pada di masa depan yang bisa digunakan sebagai panduan untuk menyisihkan uang dan pembelanjaan. Munandar (2001:3) “suatu rencana yang disusun secara sistematis, yang meliputi seluruh kegiatan perusahaan, yang dinyatakan dalam unit (kesatuan) moneter dan berlaku dalam jangka waktu (periode) tertentu yang akan datang.” Anggaran merupakan alat untuk merencanakan dan mengendalikan keuangan perusahaan dalam penyusunannya dilakukan secara periodik. Kebanyakan dari instansi memiliki pengeluaran lebih banyak dari pendapatan. Kunci dari rencana ini sesuai kemampuan adalah mengetahui berapa pendapatan dan pengeluaran pemerintah. Sebuah rencana anggaran tahunan yang baik bisa membantu untuk memastikan bahwa dapat membayar semua tagihan tepat waktu, dan memiliki cukup anggaran untuk membiayai hal-hal yang tidak terduga serta kegawatdaruratan, juga untuk mencapai tujuan keuangan

Untuk membuat atau memperbaiki rencana anggaran perlu di perhatikan hal-hal berikut :

1. Jumlahkan semua pendapatan

Untuk memulai perencanaan anggaran, pertama-tama perlu mengidentifikasi dan mencatat berapa jumlah pendapatan, menyertakan semua sumber pendapatan seperti pendapatan, semua bentuk pendapatan

2. Perkirakan Pengeluaran

Cara paling baik adalah sebelum menyusun anggaran, perlu melakukan pencatatan semua pengeluaran dalam sebulan. Bagilah antara pengeluaran tetap dan pengeluaran tidak tetap. Pengeluaran tetap adalah pengeluaran-pengeluaran yang selalu ada seperti ATK atau perjalanan dinas. Pengeluaran tidak tetap adalah pengeluaran yang berubah-ubah jumlahnya dari bulan kebulan,

3. Hitung Sisanya

Setelah menjumlahkan semua pendapatan dan pengeluaran, kurangi pendapatan dengan pengeluaran untuk mendapatkan nilai sisanya. Angka yang positif berarti memiliki pengeluaran lebih sedikit dari pendapatan dalam tahap ini lah penganalisisan di lakukan dengan menggunakan rasio efektivitas dan efesiensi apakah sudah sesuai yang telah di rencanakan Angka yang negatif berarti pengeluaran lebih besar dari pendapatan Artinya harus memangkas beberapa pengeluaran menurut Nafarin (2007:11) menyatakan bahwa “rencana merupakan kuantitatif (satuan jumlah) periodik yang disusun berdasarkan program yang telah disahkan.” Sedangkan menurut Garrison dan Noreen (2007:402) mendefenisikan rencana sebagai berikut : “ perincian tentang perolehan dan penggunaan

sumber daya keuangan dan sumber daya lainnya untuk suatu periode tertentu”.

Dari pengertian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa suatu anggaran memiliki empat unsur, yaitu :

1. Rencana yaitu suatu penentuan terlebih dahulu tentang aktivitas yang akan dilakukan di waktu yang akan datang. Dengan adanya rencana berarti ada suatu pedoman mengenai apa yang akan dilakukan sehingga pemerintah akan lebih terarah menuju tujuan yang ditetapkan
2. Meliputi seluruh kegiatan mencakup kegiatan yang akan dilakukan oleh semua bagian-bagian yang ada . Secara umum meliputi keuangan, administrasi, dan personalia.
3. Dinyatakan dalam satuan moneter yaitu satuan yang berlaku di Indonesia adalah Rupiah. Dengan unit moneter dapatlah diseragamkan semua satuan unit tersebut, memungkinkan untuk dijumlahkan, diperbandingkan serta dianalisis lebih lanjut.
4. Jangka waktu tertentu yang akan datang yaitu menunjukkan bahwa anggaran berlaku untuk masa yang akan datang. Oleh karena itu, apa yang dimuat dalam anggaran adalah taksiran-taksiran tentang apa yang akan terjadi dan apa yang akan dilakukan diwaktu yang akan datang.

Penyusunan berasal dari kata rencana, yang artinya rancangan atau rangka sesuatu yang akan dikerjakan. Dari pengertian sederhana tersebut akan diuraikan beberapa komponen penting, yakni tujuan (apa yang ingin dicapai), kegiatan (tindakan-tindakan untuk mepengaktualankan tujuan) dan waktu (kapan bilamana

kegiatan tersebut hendak dilaksanakan). Menurut Drs.H. Malayu.SP. Hasibuan rencana adalah suatu keputusan mengenai keinginan dan berisi pedoman pelaksanaan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Menurut M. Narafin (2009:4) rencana kerja adalah tindakan yang dibuat berdasarkan fakta ataupun asumsi yang mengenai gambaran kegiatan yang dilaksanakan pada waktu yang akan datang dalam mencapai tujuan yang dicapai.

Syarat-syarat penyusunan atau rencana kerja

Berikut ini adalah beberapa syarat penyusunan atau rencana kerja menurut

Wilson (2009:467) adalah sebagai berikut :

1. Logis dan masuk akal
2. Realistik atau nyata bukan imajenasi atau khayalan
3. Sederhana dan tidak berlebihan
4. Sistematis dan ilmiah
5. Objektif
6. Fleksibel
7. Bermamfaat
8. Optimasi dan efisiensi

Manfaat penyusunan atau rencana kerja

Menurut Gunawan Adiputro (2010:309) adalah sebagai berikut :

1. Rencana sebagai pengarah untuk meraih ataupun menakankan sesuatu secara lebih terkoordinasi

2. Meminimalisasi ketidakpastian, karena pada dasarnya di dunia ini tidak ada yang mengalami perubahan. Perubahan-perubahan yang terjadi membawa ketidakpastian untuk organisasi
3. Meminimalisasi pemborosan sumber daya, setiap organisasi pasti membutuhkan sumber daya
4. Penetapan standar dalam pengawasan kualitas yang harus di capai oleh organisasi atau instansi diawasi pelaksanaannya. Dalam penyusunan instansi menentukan tujuan dan rencana-rencana untuk mencapai tujuan tersebut, dalam pengawasan instansi berusaha membandingkan antara tujuan yang telah ditentukan dengan realita dilapangan, dan mengevaluasi penyimpangan yang mungkin terjadi sehingga bisa mengambil tindakan yang diperlukan untuk memperbaiki kinerja instansi.

2.1.11 Anggaran Sebagai Alat Penyusunan

Anggaran berfungsi sebagai alat rencana pada waktu menyusun program kerja yang akan disusun berdasarkan asumsi penyusunan. Anggaran yang telah disusun menjadi pedoman kerja atau standar untuk atasan. Apabila terjadi penyimpangan haruslah diselidiki penyebab penyimpangan tersebut dan segera dilaksanakan tindakan koreksi atas penyimpangan tersebut

Adapun fungsi anggaran sebagai alat penyusunan antara lain mendasarkan kegiatan pada penyelidikan studi dan penelitian, mengerahkan seluruh kegiatan organisasi, membantu atau menunjang kegiatan organisasi, menentukan tujuan-

tujuan organisasi, membantu menstabilkan kesempatan kerja yang tersedia, dan membantu pemakaian alat-alat fisik secara efektif

Dengan kata lain rencana merupakan fungsi yang paling utama. Dengan adanya penyusunan kita akan mengawasi pelaksanaan dari suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Anggaran merupakan yang paling penting dari proses penyusunan karena anggaran menentukan kepastian mengenai pengelolaan sumber daya yang ada menuju pencapaian tujuan. Anggaran yang direncanakan dengan baik menyelaraskan strategi dari struktur organisasi, manajemen dan personelnnya serta tugas-tugas yang perlu diselaraskan. Anggaran yang angkanya tinggi sering kali merupakan tanda awal bahwa aktivitas tidak berjalan sebagaimana yang telah direncanakan. Apabila dana menjadi terlalu besar, maka seluruh rencana dana mungkin perlu diperbaiki. Hal yang membuat penyusunan anggaran sangat penting di kerenaan untuk mengetahui tentang suatu tujuan dan kebijakan umum pemerintah data-data dari tahun sebelumnya kemungkinan dalam perkembangan kondisi ekonomi pengetahuan tentang sebuah tak tik kemungkinan adanya perubahan kebijakan pada pemerintah penelitian untuk pengembangan suatu instansi

Prosedur Penyusunan Anggaran

Penyusunan anggaran biasanya dilakukan oleh badan komite anggaran. anggotanya terdiri dari kepala bagian keuangan dan anggotanya, pelaksana fungsi pokok pemerintah sesuai dengan prinsip keperan sertaan. Fungsi komite anggaran adalah sebagai berikut (Mulyadi 1993 :503)

1. Merumuskan sasaran anggaran dan kebijakan pokok pemerintah untuk tahun anggaran.
2. Menyampaikan informasi mengenai tujuan dan kebijakan pokok tersebut kepada pusat pertanggungjawaban.
3. Menelaah rancangan anggaran yang diajukan oleh pusat pertanggungjawaban.
4. Melakukan negosiasi dengan pimpinan mengenai rancangan anggaran yang mereka ajukan.
5. Mengajukan rancangan anggaran pemerintah secara keseluruhan kepada dewan komisaris dan Rapat Umum
6. Menelaah anggaran yang telah disetujui oleh dewan komisaris dan Rapat Umum
7. Melakukan negosiasi dengan para pimpinan di pusat pertanggungjawaban mengenai anggaran yang telah disahkan oleh Rapat Umum
8. Melakukan revisi anggaran sesuai dengan kebijakan rapat

Penyusunan anggaran diperlukan prosedur agar anggaran yang dihasilkan merupakan hasil yang terbaik dan dapat difungsikan secara maksimal dalam menunjang tercapainya tujuan perusahaan. Prosedur merupakan urutan seri tugas yang saling berhubungan dan diadakan untuk menjamin pelaksanaan kerja yang seragam. Prosedur penyusunan anggaran adalah sebagai berikut (M.Nafarin, 2004:9)

Menurut Purwanti dan Darsono (2013 : 116) penganggaran bertujuan untuk :

- a. Memaksa manajer membuat rencana kerja,
- b. Tolak ukur mengevaluasi kinerja,
- c. Meningkatkan komunikasi dan koordinasi antar manajer,
- d. Membantu pengambilan keputusan.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa tujuan anggaran adalah untuk memberikan batasan atas jumlah anggaran yang dicari dan digunakan. Menyediakan rencana rinci mengenai aktivitas dengan maksud mengurangi ketidakpastian dan memberikan pengarahan yang jelas bagi individu dan kelompok dalam upaya mencapai tujuan pemerintah

2.1.12 Hubungan Penyusunan dengan Anggaran

Komponen utama penyusunan adalah anggaran, yang merupakan rencana keuangan untuk masa yang akan datang. Rencana tersebut mengidentifikasi tujuan dan tindakan yang diperlukan untuk mencapainya. Sebelum anggaran disiapkan, pihak manajemen terlebih dahulu harus membangun suatu rencana strategi. Rencana strategi mengidentifikasi strategi untuk aktivitas dan operasi di masa depan, umumnya mencakup setidaknya lima tahun ke depan.

2.1.13 Rencana Anggaran

Meskipun anggaran adalah suatu bentuk perencanaan, namun untuk penyusunannya harus sesuai dengan rencana strategis . Anggaran juga harus mengikuti apa yang sudah menjadi tujuan pemerintah jika anggaran dibuat hanya karena pembagian dana dari kegiatan saja, dikhawatirkan menjadi tidak sesuai dengan tujuan utama instansi karena setiap kegiatan atau program suatu

perusahaan memiliki nominal anggaran yang berbeda-beda sesuai dengan tujuannya

Menurut Bastian (2011:61) Rencana Anggaran merupakan proses pelaksanaan segala sesuatu yang telah direncanakan dan dianggarkan oleh organisasi publik. Selain itu menurut Krajewski dan Ritsman (2011:62) Rencana Anggaran adalah arahan atau pengendalian secara sistematis atas proses yang mengubah input menjadi barang dan jasa

Maka akan dikatakan bahwa Rencana Anggaran merupakan kinerja atau hasil dari kegiatan yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan adanya penggunaan dana dengan kuantitas dan kualitas yang terukur. Pengaktualan tersebut akan tercermin dari kinerja laporan kinerja yang menjelaskan secara singkat dan lengkap tentang pencapaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Sistem Rencana Anggaran

Dalam Rencana Anggaran juga menjelaskan tentang proses sistem Rencana Anggaran, menurut Bastian (2011:15) pengelolaan operasi atau Rencana Anggaran akan dilihat perspektif yang berbeda, yaitu:

- a. Sebagai fungsi, penetapan masing-masing fungsi kedalam departemen yang berbeda diasumsikan sebagai pertanggungjawaban atas aktivitas tertentu yang saling terkait satu sama lainnya

- b. Sebagai penunjang karir, operasi yang telah menjadi tingkatan kerja menuju posisi manajemen yang lebih tinggi dengan baik di beberapa organisasi
- c. Sebagai peringkat keputusan, umumnya pembuatan keputusan melibatkan berbagai langkah dasar yang sama, seperti pengenalan dan penjelasan definisi masalah, mengumpulkan informasi yang dibutuhkan untuk menganalisis alternative kemungkinan, serta memilih dan melaksanakan alternative yang terbaik

Menurut Pahala Nainggolan (2012:14) berdasarkan Siklus anggaran di atas untuk menyusun anggaran dengan memperhatikan tahapan-tahapan berikut:

1. Tahapan persiapan (*preparation*)

Hal ini akan disimpulkan melalui pimpinan organisasi/dewan Pembina organisasi dengan mendistribusikan pandangannya mengenai berbagai peluang serta kemungkinan/arahan strategis terkait yang akan dilaksanakan

2. Tahap Ratifikasi (*ratification*)

Proses selanjutnya adalah pengumpulan/kompilasi seluruh usulan dan mendiskusikannya bersama

3. Tahap Implementasi (*implementation*)

Tahap terpenting dalam proses penyusunan anggaran adalah memprediksi sumber anggaran untuk membiayai kegiatan yang

direncanakan dan mengantisipasi besar anggaran setelah itu menentukan besarnya biaya yang akan dianggarkan

4. Tahap pelaporan dan evaluasi

Tahap terakhir adalah menyusun anggaran menggunakan komponen anggaran penerimaan yang terdiri dari tiga skenario yang tersedia, pengeluaran per-unit kerja/program dengan menggunakan skenario yang sama, menetapkan biaya tetap pengelolaan organisasi sebagai minimum Realisasi yang harus diperoleh

Berdasarkan rangkaian kegiatan dalam siklus anggaran diatas, pada dasarnya ini merupakan rangkaian kegiatan setelah penetapan anggaran sehingga dana tersebut dipengaktualkan kedalam kegiatan-kegiatan organisasi yang telah ditentukan demi mencapai tujuan.

Tujuan Laporan Rencana Anggaran

Menurut Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, tujuan utama dari pelaporan Rencana Anggaran adalah menetapkan dasar-dasar penyajian laporan Rencana Anggaran untuk pemerintah dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan

2.1.14 Laporan Realisasi anggaran (LRA)

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, pembiayaan, dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode. Laporan Rencana Anggaran

menyediakan informasi berguna dalam memprediksi sumber daya ekonomi yang akan diterima untuk mendanai kegiatan pemerintah pusat dan daerah dalam periode mendatang dengan menyajikan laporan secara komprehensif. Menurut Darise Nurlan (2014:238) laporan Rencana Anggaran disajikan sedemikian rupa sehingga menonjolkan berbagai unsur Realisasi, belanja, transfer, *surplus/deficit* dan pembiayaan yang diperlukan untuk menyajikan yang wajar

Unsur Laporan Realisasi Anggaran

Laporan realisasi anggaran sendiri mencakup beberapa unsur yakni pendapatan LRA, transfer, belanja dan pembiayaan. Berikut penjelasan lengkapnya

1. Pendapatan LRA

Unsur pertama yakni pendapatan laporan realisasi anggaran atau diartikan sebagai penerimaan dari Bendahara Umum Daerah/ Negara.

Bisa juga dari entitas pemerintah yang lain dengan menambah saldo untuk anggaran lebih pada suatu periode anggaran yang dimaksud serta menjadi hak pemerintah, dengan artian tidak harus dibayar kembali.

2. Belanja

Unsur berikutnya adalah belanja yang mencakup keseluruhan pengeluaran dari Bendahara Umum Daerah/ Negara.

Kegiatan belanja ini umumnya menurunkan saldo anggaran lebih pada suatu periode anggaran yang bersangkutan. Semua transaksi yang ada di dalam aktivitas belanja nantinya tidak diperoleh bayarnya kembali dari pemerintah.

Laporan Rencana Anggaran memuat hal-hal yang mempengaruhi pelaksanaan anggaran seperti kebijakan-kebijakan yang ada, sebab terjadinya perbedaan material antara dana dan pengaktualannya, serta daftar-daftar merinci lebih lanjut angka-angka yang dianggap perlu diperjelaskan. Untuk melihat tingkat efektivitas dana digunakan rumus efektivitas yaitu dengan persamaan sebagai berikut. Menurut Sunandar (2012:16) yaitu :

$$Ef = \frac{R}{T} \times 100\%$$

Keterangan : *Ef* = Efektivitas

R = Rencana Anggaran

T = Dana yang tersedia

$$\text{rasio efektif} = \frac{\text{realisasi anggaran pendapatan}}{\text{Total anggaran pendapatan}} \times 100\%$$

Menurut Mahmudi (2013:180) dalam mengatur tingkat selisih anggaran yang baik menguntungkan maupun tidak menguntungkan antara pengaktualan dengan dana, harus diketahui tingkat efektivitasnya dalam mencapai target dan tingkat efisiensi belanja, sehingga besaran nominal selisih anggaran dengan pengaktualan akan dinilai signifikan atau tidak. Maka nilai untuk mengukur efektivitas akan di kategorikan sebagai berikut :

- Sangat efektif 100%
- Efektif 90% - 99%
- Cukup efektif 80% - 89,9%
- Kurang efektif 60% - 79,9%
- Tidak efektif <60%

Keterangan :

- a. Jika hasil perbandingan lebih dari 100%, maka anggaran pendapatan dikatakan sangat efektif
- b. Jika hasil pencapaian antara 90%-99%, maka anggaran pendapatan dikatakan efektif
- c. Jika hasil pencapaian antara 80%-89,9%, maka anggaran pendapatan dikatakan cukup efektif
- d. Jika hasil pencapaian antara 60%-79,9%, maka anggaran pendapatan dikatakan kurang efektif
- e. Jika hasil pencapaian dibawah 60%, maka anggaran pendapatan dikatakan kurang efektif

Indikator efesiensi menggambarkan hubungan antara masukan sumber daya oleh suatu unit organisasi dan keluaran yang dihasilkan. Pengukuran efesisensi dilaksanakan dengan efensi diukur dengan rasio antara output dengan input. Semakin besar output dibandingkan input, maka semakin tinggi efisiensi suatu organisasi. Dengan demikian efisiensi akan dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{rasio efisien} = \frac{\text{Rencana Anggaran Belanja}}{\text{Total anggaran Belanja}} \times 100\%$$

Adapun kriteria efisiensi, Realisasi perbandingannya diukur dengan kriteria penilaian kinerja dalam tabel berikut ini

Tabel 2.1 Kriteria Efisiensi

Presentase Efisien	Kemampuan Keuangan
Diatas 100%	Tidak Efisien
90%-100%	Kurang Efisien
80%-90%	Cukup Efisien
60%-80%	Efisien
Dibawah 60%	Sangat Efisien

Sumber : Mardiasno (2015:133)

Keterangan :

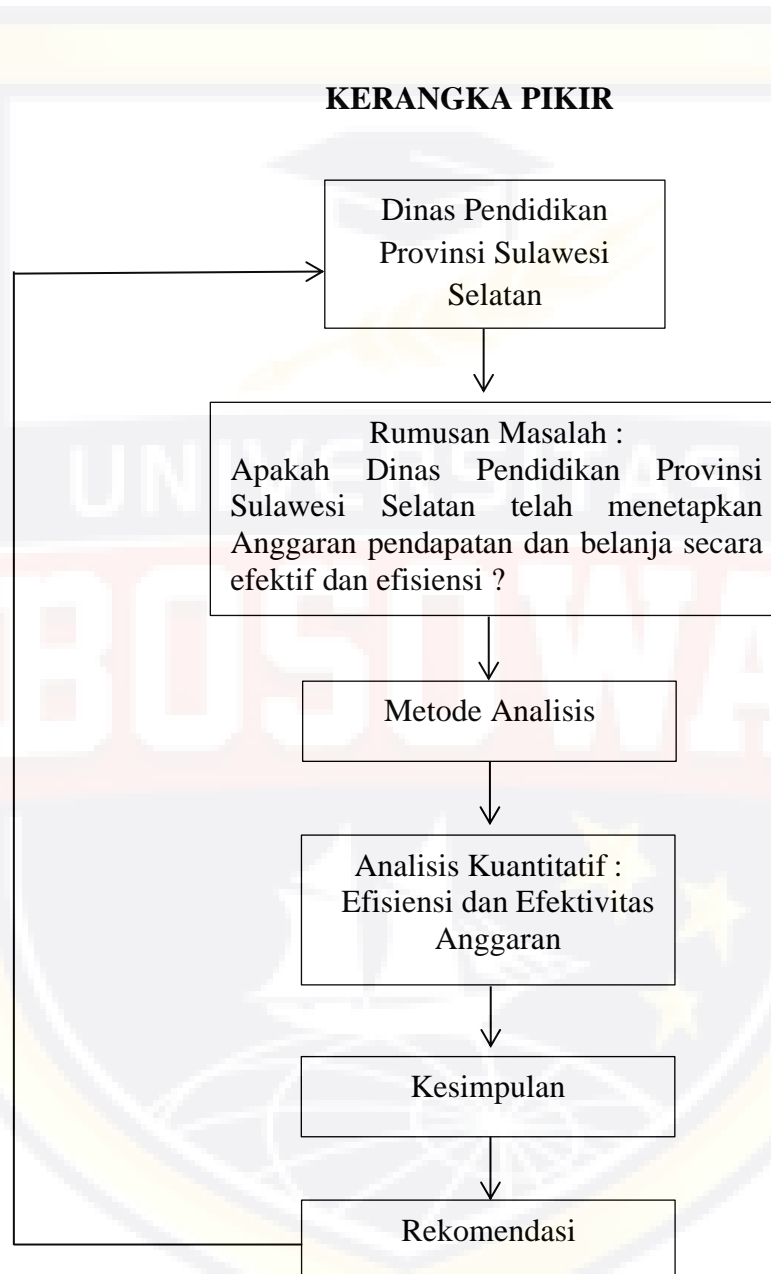
- a. Jika hasil perbandingan lebih dari 100%, maka anggaran belanja dikatakan tidak efisien
- b. Jika hasil pencapaian antara 90%-100%, maka anggaran belanja dikatakan kurang efisien
- c. Jika hasil pencapaian antara 80%-90%, maka anggaran belanja dikatakan cukup efisien
- d. Jika hasil pencapaian antara 60%-80%, maka anggaran belanja dikatakan efisien
- e. Jika hasil pencapaian dibawah 60%, maka anggaran belanja dikatakan sangat efisien

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Tentang laporan Realisasi Anggaran, manfaat suatu laporan Realisasi Anggaran berkurang, jika laporan tersebut tidak tersedia tepat waktu. Faktor-faktor seperti kompleksitas operasi pemerintahan tidak dijadikan pembenaran atas ketidakmampuan pelaporan

untuk menyajikan laporan keuangan tepat waktu. Suatu entitas pelaporan menyajikan laporan Rencana Anggaran selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah berakhirnya tahun dana.

2.2 Kerangka Pikir

Anggaran pemerintah pada Dinas Pendidikan terkait menggunakan proses penentuan jumlah alokasi anggaran buat tiap-tiap acara & kegiatan pada satuan moneter yang memakai dana milik masyarakat. Anggaran publik adalah indera perencanaan sekaligus indera pengendalian. Anggaran menjadi indera perencanaan mengidentifikasi sasaran yang wajib dicapai sang pemerintah, sedangkan aturan yang ditujui legislative buat dibelanjakan. Pengukuran efektif & efisien aturan pendapatan & belanja dalam dinas pendidikan bisa dilaksanakan menggunakan menghitung efektif & efisien aturan belanja pemerintah. Efektif adalah kemampuan dinas pendidikan pada merealisasikan aturan yang sudah direncanakan dibandingkan menggunakan sasaran yang ditetapkan menurut potensi riil pemerintah. Sementara efisiensi merupakan yang mendeskripsikan perbandingan realisasi pengeluaran (belanja) menggunakan realisasi pendapatan dinas pendidikan . Kerangka pemikiran bisa dipandang dalam gambar 2.1 menjadi berikut

Gambar 2.1. Kerangka Pikir

2.2 Hipotesis

Sugiyono (2013) menyatakan bahwa adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana masalah tersebut dinyatakan dalam bentuk kalimat pernyataan. Hipotesis timbul sebagai dugaan yang bijaksana dari peneliti atau diturunkan dari teori yang telah ada, maka hipotesis yang di ajukan adalah sebagai berikut :

“Diduga bahwa perencanaan dan realisasi anggaran efektif dan efisien pada Dinas Pendidikan Sulawesi- Selatan”



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan pada Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi-Selatan, Km10, Jl. Perintis Kemerdekaan, Tamalanrea Indah, Kec. Tamalanrea, Kota Makassar, 90245 . Dilaksanakan penelitian ini dimulai pada bulan April Sampai bulan Mei

3.2 Jenis dan Sumber Data

3.2.1 Jenis Data

Jenis penelitian ini memiliki 2 jenis yaitu sebagai berikut :

1. Data kualitatif pendekatan penelitian kualitatif menekankan pada fenomena-fenomena yang dialami oleh subjek penelitian, data kualitatif digunakan dalam penelitian ini adalah data hasil pengukuran yang dinyatakan dalam bentuk kata-kata atau penjelasan yang meliputi penyusunan Laporan Rencana Anggaran Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi-Selatan
2. Data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka-angka atau data yang disajikan dalam bentuk angka-angka, sifat data ini adalah runtut waktu yaitu data yang merupakan hasil pengamatan dalam suatu periode tertentu

3.2.2 Sumber Data

1. Data Primer merupakan sumber data yang diperoleh secara langsung dari objek yang diteliti. Data ini diperoleh dengan cara wawancara kepada untukan keuangan Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi-Selatan
2. Data Sekunder, data yang digunakan merupakan data yang yang sudah ada dalam bentuk dokumen-dokumen, file,foto dan laporan-laporan

3.3 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data berupa suatu pernyataan tentang sifat, keadaan, kegiatan, tertentu dan sejenisnya, pengumpulan data dilaksanakan untuk menandakan suatu informasi yang dibutuhkan dalam mencapai tujuan penelitian

Dalam penyusunan tugas akhir ini penulis mengambil objek metode pengumpulan data sebagai berikut :

1. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) adalah penelitian yang dilaksanakan dengan cara mempelajari teori-teori dan informasi yang berhubungan dengan objek penelitian sebagai pedoman pokok dalam pengumpulan data lapangan
2. Penelitian Lapangan (*Field Research*)
 - a. Observasi suatu metode pengumpulan data yang dilaksanakan dengan mengamati langsung.
 - b. Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilaksanakan melalui tatap muka langsung dengan narasumber dengan cara Tanya jawab langsung.

- c. Dokumentasi suatu pengumpulan data dengan cara melihat langsung sumber-sumber dokumen yang terkait. Dengan arti lain bahwa dokumentasi sebagai pengambilan data melalui dokumen tertulis maupun elektronik. Digunakan sebagai mendukung kelengkapan data yang lain

3.4 Metode Analisis

Efektif menggambarkan kemampuan Pemerintah Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan dalam mepengaktualankan anggaran yang direncanakan dibandingkan target yang ditetapkan berdasarkan potensi rill. Kemampuan Pemerintah Dinas Pendidikan Provinsi Selatan dalam menjalankan tugas dikategorikan efektif apabila rasio yang dicapai minimal sebesar 1 (satu) atau 100 persen. Semakin tinggi rasio efektivitas menggambarkan kemampuan yang semakin baik

Secara efektif menggambarkan kemampuan Dinas Pendidikan Sulawesi Selatan untuk mencapai anggaran yang direncanakan dan tujuan yang ditetapkan berdasarkan kemampuan yang sebenarnya. Jika persentase yang dicapai minimal 1 (satu) atau 100%, maka kemampuan pemerintah Dinas Pendidikan Provinsi Selatan dalam melaksanakan tugasnya dianggap efektif. Semakin tinggi koefisien, efisiensi menggambarkan potensi perbaikan.

Tingkat efektivitas diukur dengan cara membandingkan Rencana Anggaran Realisasi dengan total dana Realisasi (Mahsun 2013) :

$$\text{rasio efektif} = \frac{\text{Rencana Anggaran pendapatan}}{\text{Total anggaran pendaptan}} \times 100\%$$

Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 690.900-327 Tahun 1996, kriteria tingkat efektifitas dana belanja sebagai berikut :

1. Jika hasil perbandingan lebih dari 100% maka pendapatan dikatakan sangat efektif
2. Jika hasil pencapaian 100%, maka pendapatan dikatakan efektif
3. Jika hasil pencapaian antara 90%-99% maka pendapatan dikatakan cukup efektif
4. Jika hasil pencapaian 75%-89% maka pendapatan dikatakan kurang efektif
5. Jika hasil pencapaian di bawah 75% maka pendapatan dikatakan tidak efektif

Tingkat efisiensi juga diukur dengan cara membandingkan Realisasi Anggaran belanja dengan total anggaran belanja (Mahmun 2013:141)

$$\text{rasio efisiensi} = \frac{\text{Rencana Anggaran belanja}}{\text{total anggaran belanja}} \times 100\%$$

Keputusan menteri dalam negeri No 690.900-327 Tahun 1996, kriteria tingkat efisiensi adalah sebagai berikut :

1. Jika hasil perbandingan lebih dari 100% maka anggaran belanja dikatakan tidak efisien
2. Jika hasil pencapaian antara 90%-100% maka anggaran belanja dikatakan kurang efisien

3. Jika hasil pencapaian antara 80%-90% maka anggaran belanja dikatakan cukup efisien
4. Jika hasil pencapaian antara 60%-80% maka anggaran belanja dikatakan efisien
5. Jika hasil pencapaian dibawah 60% maka anggaran belanja di katakan sangat efisien

3.5 Defenisi Operasional

1. Rencana anggaran biaya adalah rencana anggaran yang diperlukan untuk pelaksanaan atau rencana kerja dalam jangka waktu tertentu. Penelitian ini menggunakan perencanaan anggaran untuk mengetahui apakah perencanaan konsisten dengan kinerja.
2. Pelaksanaan anggaran adalah jenis anggaran yang merupakan hasil atau hasil kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan rumah tangga, dengan indikator kuantitatif dan kualitatif yang terukur.
3. Efisiensi anggaran erat kaitannya dengan konsep produktivitas.
4. Efisiensi adalah upaya untuk mencapai tujuan yang diharapkan sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan oleh individu dan lembaga .
5. Pelaksanaan anggaran belanja adalah semua pengeluaran dari total kas/daerah yang aset likuiditasnya digunakan untuk pemerintah yang tidak menerima penggantian untuk tahun anggaran yang sesuai periode pengembalian.
6. Anggaran pendapatan adalah semua penerimaan dari rekening kas negara/daerah yang menambah modal kerja selama tahun anggaran yang

merupakan hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Instansi Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan Makassar

4.1.1 Sejarah Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan Makassar

Latar belakang terbentuknya kantor Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan Makassar, yaitu pada masa terbentuknya Negara Indonesia Timur (NIT) yang di kepalai oleh menteri pengajaran yang bernama Katoppo. Kantor wilayah pada saat itu bertempat di gedung SMA Candra Kirana yang sekarang berada di jalan sungai Tangka. Pada tahun 1946-1950, Departemen Pendidikan Daerah Sulawesi Selatan yang dikepalai Azis Nompo. Pada tahun 1950 inspektur pendidikan di daerah Sulawesi Selatan berubah namanya menjadi kantornya jawatan pengajaran provinsi Sulawesi Selatan yang di kepalai oleh H. Sondat dan wakilnya Mangindaan. Kantor tersebut bertempat di kantor wali kota Madya Tk.II Ujung Pandang sekarang berada di jalan Jendral Ahmad Yani. Pada tahun 1957 kantor tersebut berubah nama menjadi perwakilan Departemen Pendidikan Dasar dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Selatan Tenggara.

Pada tahun 1960, posisinya digantikan oleh S.N. Turangan dan wakilnya H. Laside. Pada bulan Agustus 1964, H. Laside diangkat sebagai kepala perwakilan Departemen Pendidikan Dasar dan Kebudayaan sampai tahun 1967, dan dimutasi pada tahun yang sama. Pada tahun 1968, Direktur Departemen Pendidikan Dasar dan Kebudayaan dipindahkan dari Siamsudin Tan kepada E. Agus Salim Mokodompit sebagai Direktur Organisasi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

Pada 19 Desember 1979, ia dipindahkan ke jabatan Direktur Departemen Daerah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Selatan. A. Rasiid dipindahkan ke Letnan Kolonel Soepomo. Pada tanggal 22 Februari 1983, direktur Departemen Daerah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Selatan dimutasi menjadi doktor. Pada tahun 1 setelah dipindahkan dan kepemimpinan berubah. Dr Atahila Aminudin Mahmoud. Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 09/MPK/1991 tanggal 17 Februari 1991, jabatan Direktur Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Selatan dialihkan oleh seorang dokter. Dr. Aminuddin Mahmoud (Aminuddin Mahmoud) Abdul Jabar Selain itu, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 217/c/1993 memutuskan untuk mengubah posisi Direktur Departemen Wilayah Departemen Pendidikan Sulawesi Selatan pada tanggal 4 Januari 1994. PhD. Abdul Jabar dijabat oleh Dr. Amiruddin Maula sebagai direktur regional Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kalimantan Timur. Kemudian, jabatan Direktur Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Selatan diambil alih oleh PhD. Pemandahan Amiruddin Maula Irman HMarifin Talib.

Pada tanggal 1 Januari 2001, Dr. Ir.HM Arifin Talib, Ngaro MP, sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 173.0 Tahun 1983 tentang Susunan Organisasi Vertikal, Tata Kerja Kanwil Departemen Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan diubah menjadi Kementerian Pendidikan. Dinas Provinsi Sulawesi Selatan dipimpin oleh seorang PhD. Ngaro, M.Pd yang akan mengakhiri masa jabatannya sebagai direktur Dinas Pendidikan Sulawesi

Selatan dilantik oleh Dr. Ngaro. Apa. Mengganti Perwakilan Muh Noer Sanusi, M.Si dan Drs. Hanafi Mappaonba, M.Pd.Como.

Setelah 31 Oktober 2005, M.Si. Mukh Noer Sanusi mengakhiri masa jabatannya dan digantikan oleh PhD. HAPatabai Pabokori (HAPatabai Pabokori) adalah Bupati Bulukumba.Hanafi Mappasomba menjabat dan digantikan oleh Dr. Muh Saleh Gottang. Setelah berakhirnya masa jabatan Dokter Kh.A. Patabay Pabokori digantikan oleh Dr. H. Abdullah Jabar, M.D. pada 1 Juli 2012 pada 2 Juli 2012, sebagai pejabat eksekutif mantan Sekretaris Biro Pendidikan Selatan. Provinsi Sulawesi diangkat sebagai PhD. Muh Saleh Gottang dipercayakan untuk pensiun. Setelah wafat digantikan oleh H.Imran Yasin Limpo,SH pada tanggal 5 September 2016 hingga pada tahun 2020 H.Imran Yasin Limpo,SH digantikn oleh Prof.Dr.H.Muhammad Jufri.M.Si.,M.Psi.Psikolog sampai sekarang

4.1.2 Visi dan Misi Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan

a. Visi

Terwujudnya Fasilitas Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus yang Berbutu dan Tercapai untuk anak usia sekolah

b. Misi

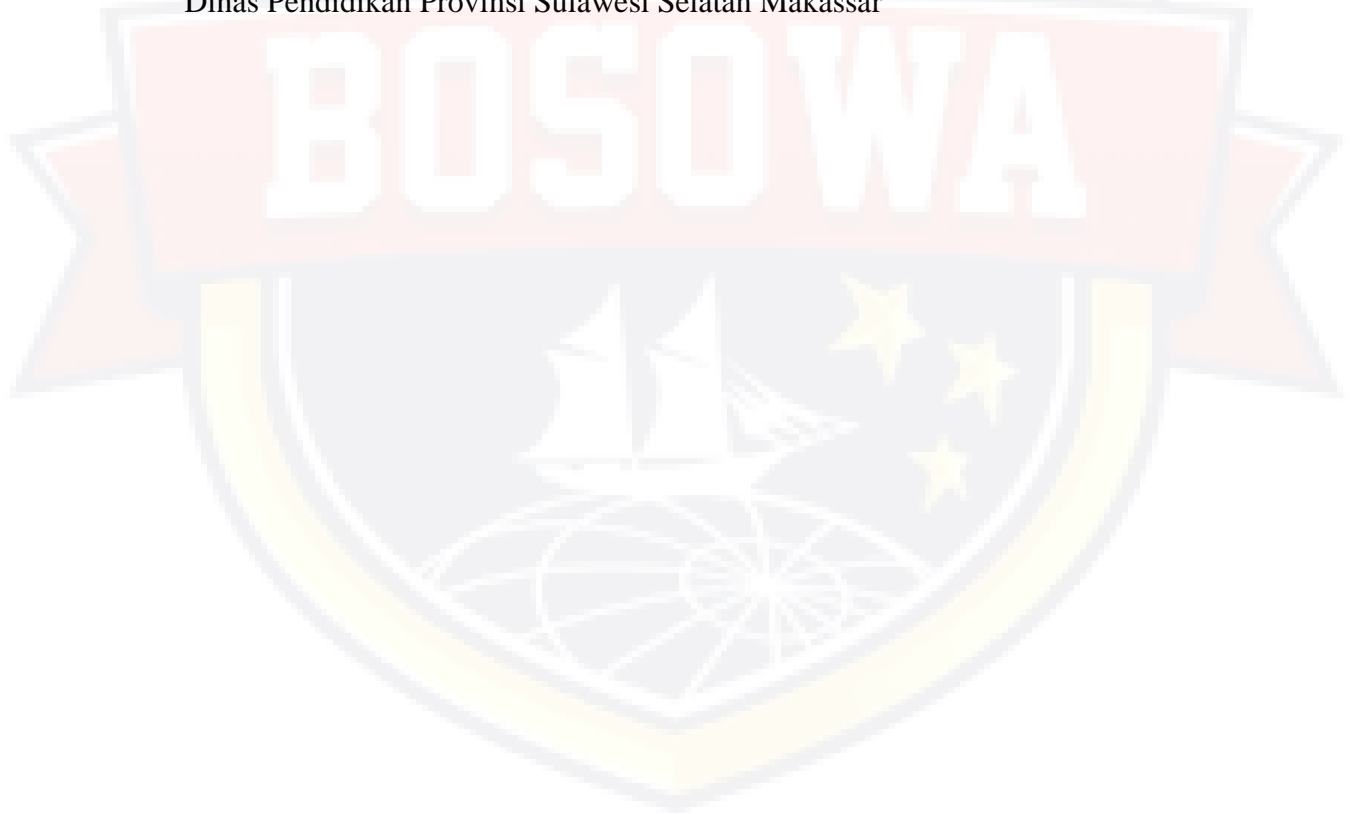
1. Membagikan kependidikan yang pantas dengan nilai norma Kemanusiaan
2. Memberikan jalan pendidikan kepada siswa yang berkebutuhan khusus agar mendapatkan pendidikan yang berkualitas
3. Memajukan pemikiran dan apresiasi kepada perbedaan untuk mengarah kepada Masyarakat yang Demokratis

4. Memajukan pengembangan dan penyemerataan untuk mendapatkan pendidikan
5. Memajukan perbaikan manajemen kependidikan
6. Memanfaatkan lembaga pendidikan untuk meluaskan keterlibatan masyarakat
7. Memajukan ketentraman sumber daya kependidikan
8. Membangun pola dan suasana pengawasan yang berdaulat dan adil

4.1.3 Struktur Organisasi

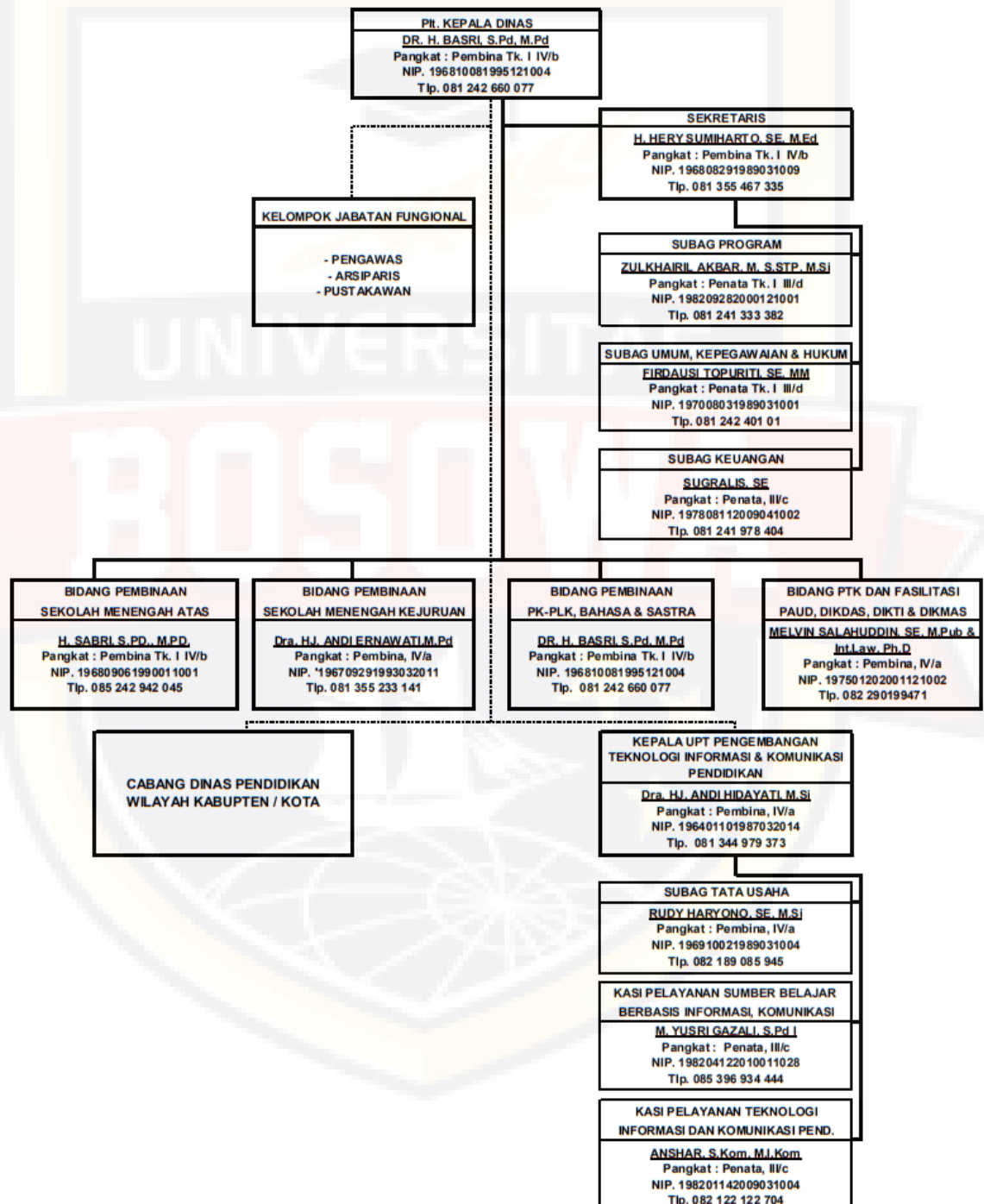
Berikut dibawah ini yang merupakan gambar dari struktur organisasi

Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan Makassar





**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SULAWESI SELATAN**



Sumber : Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan 2021

4.1.4 Uraian Tugas Personil Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan Makassar

Adapun uraian tugas yang dilaksanakan dari masing-masing bidang sebagai berikut :

1. Kepala Dinas

Menjamin terlaksananya proses pendidikan di sekolah yang ada di wilayahnya (Sulawesi Selatan) selain itu Kepala Dinas juga berhak melakukan pemecatan dan pemindahan kepada guru dan bawahannya serta bertugas memimpin pengawasan, melaksanakan koordinasi penelenggaraan dibidang pendidikan dan kebudayaan

2. Sekertaris

Memiliki fungsi dalam membuat dan menyusun surat menyurat serta meneruskan surat edaran

3. Subag umum dan kepegawaian

Mengelola administrasii kepegawaian, kesejataan, pendidikan dan penelitian dan pelatihan pegawai serta pembina organisasi

4. Subag Program

Bertugas untuk melakukan pengumpulan dan penyajian data yang sudah di masukan ke dalam data statistik serta melakukan penyusunan laporan dinas

5. Subag Bagian Keuangan

Mempunyai tugas dalam hal keuangan mengatur administrasi keuangan serta melakukan penyusunan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), selain itu juga subag bagian keuangan bertugas

melakukan penagihan hutang pada daerah yang telah menjadi tugas dan tanggungjawabnya

6. Bidang Pembinaan Pendidikan Khusus/Layanan Khusus

Bertugas menyelenggarakan layanan kepada publik, serta melaksanakan penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis dan bahan fasilitas bidang PK/PLK, meliputi aspek kurikulum dan kesiswaan PK-PLK, alat bantu media PK/PLK, serta ketenangan pendidikan khusus

7. Bidang Fasilitas Paud, Dikmas dan Dikti

Mempunyai tugas dalam Menyelenggarakan urusan pemerintah bagian bidang pendidikan pada anak usia dini, dasar dan menengah

8. Bidang Pendidikan Menengah Atas

Bertugas mengembangkan dan membina kurikulum pada sistem pengujian, profesi, dan sumber daya manusia pada tenaga kependidikan

9. Bidang Pendidikan Menengah Kejuruan

Membina dan Mengembangkan kurikulum dan sistem pengujian.

10. Bidang Pendidikan non formal dan informal

Menangani masalah pada pendidikan kesejahtraan paket A,B, dan C

11. UPTD Balai Kajian dan Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi

Meningkatkan serta mengembangkan kompetensi teknologi informasi dan komunikasi Pendidikan. Adapun untukan-untukannya adalah sebagai berikut :

a. Kasubag Tata usaha

Bertugas untuk mendistribusikan layanan administrasi ke semua unsur yang ada di lingkungan dinas pendidikan (Sulawesi Selatan)

b. Kepala Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan

Untuk ini mempunyai tugas pokok membantu kepala balai dan melaksanakan koordinasi dalam pelaksanaan tugas .

12. Kepala UPT Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan Guru dan Tenaga Kependidikan (P3GTK)

Melaksanakan pembinaan pengembangan peningkatan mutu, menyusun standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur, mendistribusikan bimbingan teknis dan evaluasi tenaga pendidik dan tenaga pendidikan

a. Kasubag Tata Usaha

Mempunyai tugas untuk mendistribusikan layanan administrasi kepada semua yang ada di lingkungan P3GTK

b. Kepala Seksi Diklat Tenaga Kependidikan, Penelitian Kinerja dan Pengembangan Karir

Mempunyai tugas pokok untuk mendistribusikan petunjuk kepada dan memberikan laporan hasil dari pelaksanaan kegiatan atau tugas kepada Kepala Bidang serta pemetaklat tenaga pendidikan

c. Kepala Seksi Diklat Peningkatan Kompetensi, Penghargaan dan Kesejahteraan Guru

Mempunyai fungsi pokok menyusun rencana kegiatan dan pelatihan karir serta melakukan penugasan kedinasan lainnya yang diarahkan langsung oleh atasan untuk bawahan.

4.2. Deksriptif Data

Laporan keuangan yang akan diukur berdasarkan dana yang telah dibuat oleh Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan, penulis hanya melakukan penilaian laporan dengan menganalisis tingkat efisiensi dan efektivitas pada laporan keuangan pendapatan dan belanja

1. Hasil analisis keuangan Kantor Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan dapat dilihat pada Dana APBD. Berikut merupakan uraian langkah efisiensi dan efektivitas :

a) Ringkasan data dana mengenai APBD Tahun 2018-2021

Tabel 4.1.

Daftar Pengaktualan Dan Anggaran Pertahun Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan 2018 -2020

No	Tahun	Uraian	PAGU	Pengaktualan
1	2018	Realisasi	145.650.000.00	1.662.277.069.60
		Belanja	2.579.455.152.852.42	2.519.744.926.642.00
		Belanja Tidak Langsung	1.894.692.298.330.00	1.862.701.309.602.00
		Belanja Langsung	684.763.854.522.42	657.043.617.040.00
2	2019	Realisasi	268.845.000.00	997.399.169.80
		Belanja	2.624.917.540.846.05	2.591.982.623.125.00
		Belanja Tidak Langsung	1.917.439.951.345.05	1.893.856.911.750.00
		Belanja Langsung	707.477.589.492.00	698.125.711.375.00
3	2020	Realisasi	30.180.000.00	809.885.195.40

Belanja		2.699.275.327.038.90	2.075.138.603.378.00
Belanja	Tidak	1.845.253.795.439.30	1.773.848.533.778.00
	Langsung		
Belanja	Langsung	854.021.531.599.60	301.290.069.600.00

Sumber: Data Diolah 2021

b) Membuat Kesimpulan

Dari hasil menunjukan bahwa untuk belanja, Rencana Anggaran belanja lebih rendah dari rencana anggaran yang berarti belanja untuk tahun dana 2018-2020 bersifat menguntungkan.

Tabel 4.2
Kesimpulan Analisis Varians

No	Tahun	Uraian	%	Keterangan
1	2018	Realisasi	1.139.64	Meningkat
		Belanja	97.69	Menguntungkan
		Belanja Tidak Langsung	98.31	Menguntungkan
		Belanja Langsung	95.95	Menguntungkan
2	2019	Realisasi	370.99	Meningkat
		Belanja	98.75	Menguntungkan
		Belanja Tidak Langsung	98.77	Menguntungkan
		Belanja Langsung	98.68	Menguntungkan
3	2020	Realisasi	268.35	Meningkat
		Belanja	76.88	Menguntungkan
		Belanja Tidak Langsung	96.13	Menguntungkan

Sumber: Data Diolah 2021

2. Tingkat efisiensi pengaktualan dan anggaran pertahun Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2018-2020.

4.2.1 Analisis Efisiensi

1) Mengumpulkan data mengenai Ringkasan Perhitungan Pengaktualan Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2018-2020 yang akan dilihat pada tabel berikut dibawah ini :

Tabel 4.3

Ringkasan Perhitungan Pengaktualan Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2018-2020

No	Tahun	Uraian	PAGU	Pengaktualan
1	2018	Total Belanja	2.579.455.152.852.42	2.519.744.926.642.00
2	2019	Total Belanja	2.624.917.540.846.05	2.591.982.623.125.00
3	2020	Total Belanja	2.699.275.327.038.90	2.075.138.603.378.00

Sumber: Data Diolah 2021

2) Melakukan perbandingan antara pengaktualan pengeluaran rutin dan jumlah pengaktualan Realisasi yang akan dikalikan seratus (100) kedalam bentuk persentase. Analisis efesiensi ini agar di ketahui bahwa seberapa besar tingkat efesiensi pada proyek ataupun kegiatan yang dilaksanakan dengan membandingkan output dan input

Peningkatan Rasio Efisiensi relisasi pada Kantor Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2018-2020:

a) Efisiensi Tahun 2018

$$\text{rasio efisiensi} = \frac{2.519.744.926.642.00}{2.579.455.152.852.42} \times 100\%$$

$$= \mathbf{97.69\% \text{ (kurang efisien)}}$$

b) Efisiensi Tahun 2019

$$\text{rasio efisiensi} = \frac{2.591.982.623.125.00}{2.624.917.540.846.05} \times 100\%$$

$$= \mathbf{98.75\% \text{ (kurang efisien)}}$$

c) Efisiensi Tahun 2020

$$\text{rasio efisiensi} = \frac{2.075.138.603.378.00}{2.699.275.327.038.90} \times 100\%$$

$$= \mathbf{76.88\% \text{ (cukup efisien)}}$$

3) Membuat kesimpulan

Hasil menunjukan temuan bahwa:

- a. Tingkat efisiensi belanja menurut Kantor Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan untuk Tahun Dana 2018 sebesar 97.69% yang berarti kurang efisien.
- b. Tingkat efisiensi belanja menurut Kantor Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan untuk Tahun Dana 2019 sebesar 98.75% yang berarti kurang efisien
- c. Tingkat efisiensi belanja menurut Kantor Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan untuk Tahun Dana 2020 sebesar 76,88% yang berarti efisien.

4.1.5 Analisis Efektivitas

1. Mengumpulkan data mengenai Ringkasan Perhitungan Realisasi Kantor Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2018-2020 yang akan dilihat pada tabel dibawah ini

Tabel 4.4
Ringkasan Perhitungan Realisasi Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2018-2020

No	Tahun	Uraian	PAGU	Pengaktualan
1	2018	Total Pengaktualan Realisasi Menurut Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan	145.650.000.00	1.662.277.069.60
2	2019	Total Pengaktualan Realisasi Menurut Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan	268.845.000.00	997.399.169.80
3	2020	Total Pengaktualan Realisasi Menurut Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan	30.180.000.00	809.885.195.40

Sumber: Data Diolah 2021

2. Perhitungan analisis efektivitas pengelolaan anggaran Kantor Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2018-2020.

Tingkat Rasio efektivitas pengaktualan menurut Kantor Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2018-2020

- a) Efektivitas Tahun 2018

$$\text{rasio efektivitas} = \frac{1.662.277.069.60}{145.650.000.00} \times 100\%$$

= 1,139.6% (sangat efektif)

b) Efektivitas Tahun 2019

$$\begin{aligned} \text{rasio efektivitas} &= \frac{997.399.169.80}{268.845.000.00} \times 100\% \\ &= \mathbf{370.99\% \text{ (sangat efektif)}} \end{aligned}$$

c) Efektivitas Tahun 2020

$$\begin{aligned} \text{rasio efektivitas} &= \frac{809.885.195.40}{30.180.000.00} \times 100\% \\ &= \mathbf{268.35\% \text{ (sangat efektif)}} \end{aligned}$$

3. Membuat Kesimpulan

Hasil analisis efektivitas ditemukan bahwa:

- a. Tingkat efektivitas Realisasi menurut Kantor Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan untuk Tahun Dana 2018 sebesar 1,139.6% yang berarti sangat efektif.
- b. Tingkat efektivitas Realisasi menurut Kantor Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan untuk Tahun Dana 2019 sebesar 370.99% yang berarti sangat efektif
- c. Tingkat efektivitas Realisasi menurut Kantor Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan untuk Tahun anggaran 2020 sebesar 268.35% yang berarti sangat efektif

4.3. Pembahasan

Hasil analisis yang dilakukan oleh peneliti terkait dengan efisiensi dan analisis efektivitas Kantor Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan untuk Tahun anggaran 2018-2020, sehingga diperlukan pembahasan lebih lanjut.

Analisis rencana dan realisasi keuangan Kantor Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan di lihat dari PAGU.

4.3.1. Realisasi

Pada untuk Realisasi, total PAGU tahun 2018 sebesar Rp. 145.650.000. dan pengaktualan sebesar Rp 1.662.277.069.60 yang berarti pengaktualan Realisasi naik mencapai 1,139.64% dari anggaran yang telah ditentukan. Selanjutnya pada total PAGU tahun 2019 sebesar Rp. 268.845.000.00 dan pengaktualan sebesar Rp 997.399.169.80 yang berarti pengaktualan Realisasi naik mencapai 370.99% dari anggaran yang telah ditentukan. Terakhir pada total PAGU tahun 2020 sebesar Rp. 30.180.000.00 dan pengaktualan sebesar Rp 809.885.195.40 yang berarti pengaktualan Realisasi naik mencapai 268.35% dari dana yang telah ditentukan. Dengan demikian hasil analisis menunjukkan bahwa rasio Realisasi Kantor Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2018-2020 diklasifikasikan menjadi sangat efektif.

4.3.2. Belanja

Pada untukan total pos belanja tahun 2018 sebesar Rp2.579.455.152.852.42 dimana pengaktualan belanja Rp2.519.744.926.642.00 turun dari dana yang telah ditentukan tingkat efisiensi belanja menurut Kantor Dinas Pendidikan Provinsi

Sulawesi Selatan untuk Tahun Dana 2018 sebesar 97.69% dinyatakan kurang efisien. Selanjutnya total pos belanja tahun 2019 sebesar Rp2.624.917.540.846.05 dimana pengaktualan belanja Rp2.591.982.623.125.00 juga menurun sehingga tingkat efisiensi belanja menurut Kantor Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan untuk Tahun Dana 2019 sebesar 98.75% dan dinyatakan kurang efisien. Pada tahun 2020 total pos belanja sebesar Rp30.180.000.00 dimana pengaktualan belanja Rp809.885.195.40 dimana pengaktualan belanja mengalami peningkatan dari dana yang telah ditentukan sehingga tingkat efisiensi belanja menurut Kantor Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan untuk Tahun Dana 2020 sebesar 78,88% dan dinyatakan efisiensi.

1. Belanja Tidak Langsung

Pada pos belanja tidak langsung pada tahun 2018 total dana yang ditentukan sebesar Rp 1.894.692.298.330.00 dan pengaktualan sebesar Rp. 1.862.701.309.602.00 artinya pengaktualan pada pos belanja tidak langsung pada tahun 2018 turun dan diartikan tidak menguntungkan. Disamping itu, pada pos belanja tidak langsung pada tahun 2019 total dana yang ditentukan sebesar Rp 1.917.439.951.345.05 dan pengaktualan sebesar Rp. 1.893.856.911.750.00 artinya pengaktualan pada pos belanja tidak langsung pada tahun 2019 turun dan diartikan tidak menguntungkan. Selanjutnya pada pos belanja tidak langsung pada tahun 2020 total dana yang ditentukan sebesar Rp 1.845.253.795.439.30 dan pengaktualan sebesar Rp1.773.848.533.778.00 artinya pengaktualan pada pos belanja tidak langsung pada tahun 2020 turun dan diartikan tidak menguntungkan. Dengan demikian dari hasil analisis total belanja tidak langsung Kantor Dinas

Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2018-2020 tergolong tidak menguntungkan.

2. Belanja Langsung

Pada pos belanja langsung pada tahun 2018 total dana yang ditentukan sebesar Rp 684.763.854.522.42 dan pengaktualan sebesar Rp. 657.043.617.040.00 artinya pengaktualan pada pos belanja langsung pada tahun 2018 turun dan diartikan tidak menguntungkan. Disamping itu, pada pos belanja langsung pada tahun 2019 total dana yang ditentukan sebesar Rp 707.477.589.492.00 dan pengaktualan sebesar Rp. 698.125.711.375.00 artinya pengaktualan pada pos belanja langsung pada tahun 2019 turun dan diartikan tidak menguntungkan. Selanjutnya pada pos belanja langsung pada tahun 2020 total dana yang ditentukan sebesar Rp 854.021.531.599.60 dan pengaktualan sebesar Rp. 301.290.069.600.00 artinya pengaktualan pada pos belanja tidak langsung pada tahun 2019 turun dan diartikan tidak menguntungkan. Dengan demikian dari hasil analisis total belanja langsung Kantor Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2018-2020 tergolong tidak menguntungkan.

4.3.3. Tingkat Efisiensi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat efisiensi belanja Kantor Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2018-2020 dinyatakan kurang efisien. Hal ini didukung oleh data dan hasil analisis. Adapun hasil analisis menunjukkan bahwa tingkat efisiensi belanja menurut Kantor Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan untuk Tahun Dana 2018 sebesar 97.69% yang berarti kurang efisien. Selanjutnya tingkat efisiensi belanja menurut Kantor Dinas

Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan untuk Tahun Dana 2019 sebesar 98.75% yang berarti kurang efisien. Disamping itu, tingkat efisiensi belanja menurut Kantor Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan untuk Tahun Dana 2020 sebesar 78,88% yang berarti efisien Dengan demikian akan diketahui bahwa dari total belanja untuk tahun dana 2018-2020 hanya pada tahun 2020 total belanja dinyatakan efisien.

4.3.4. Tingkat Efektivitas

Hasil analisis menunjukkan bahwa tingkat efektivitas Realisasi menurut Kantor Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan untuk Tahun anggaran 2019 sebesar 1,139.6% yang berarti sangat efektif.

Selanjutnya tingkat efektivitas Realisasi menurut Kantor Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan untuk Tahun anggaran 2019 sebesar 370.99% yang berarti sangat efektif Disamping itu tingkat efektivitas Realisasi menurut Kantor Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan untuk Tahun anggaran 2020 sebesar 268.35% efektif. Dengan demikian akan diketahui bahwa total Realisasi Kantor Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan untuk Tahun anggaran 2018-2020 dinyatakan sangat efektif.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

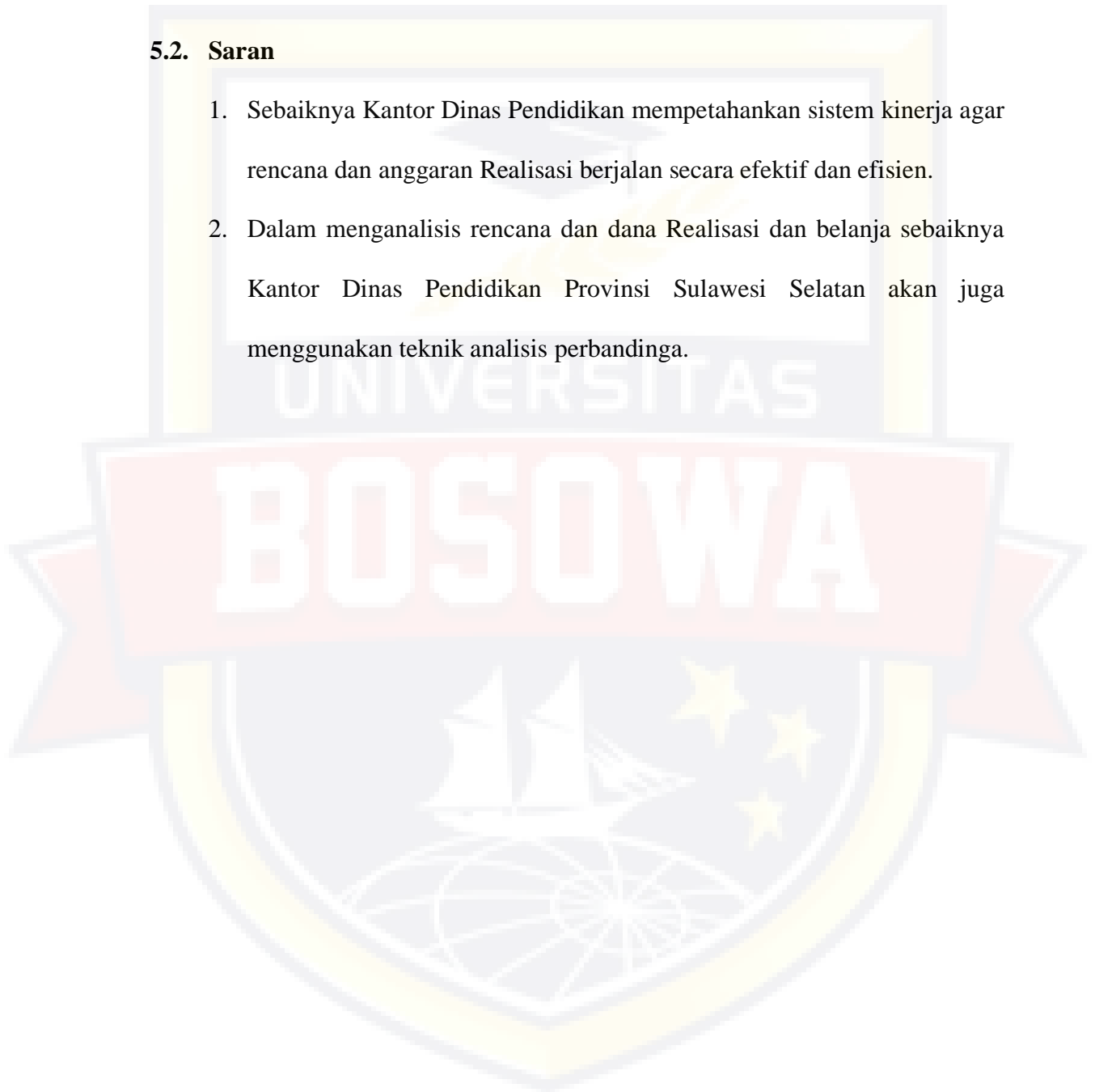
Hasil temuan ini dijelaskan sebagai berikut:

1. Pada Realisasi, total PAGU tahun 2018 tepengaktualan yang berarti pengaktualan Realisasi naik mencapai 370.99%, tahun pengaktualan Realisasi naik mencapai 268.35% dari anggaran yang telah ditentukan. Pada untukan total pos pengaktualan turun dari anggaran tersedia, tahun 2018 anggaran belanja sebesar 97.69% Selanjutnya pengaktualan total pos belanja juga menurun dan tahun 2020 pengaktualan pos belanja mengalami peningkatan pada aggaran yang tetapkan. Pelaksanaan ini berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan yang baru sehingga membutuhkan total anggaran yang memadai untuk pelaksanaan penyusunan aktivitas tersebut.
2. Hasil analisis menunjukkan bahwa diketahui tingkat efisiensi belanja Kantor Dinas Pendidikan pada tahun 2018-2020 dinyatakan kurang efisien karena di tahun 2018 dan 2019 mengalami kenaikan anggaran dengan 97.69% dan 98.75% Hasil analisis menunjukkan bahwa tingkat efektivitas Realisasi menurut Kantor Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan untuk Tahun Dana 2018 sebesar 1,139.6% yang berarti sangat efektif. Dengan demikian akan akan disimpulkan bahwa total belanja pada tahun 2018-2020 dinyatakan kurang efisien dan pada tahun 2020 dinyatakan efisien. Selain itu, peneliti mendistribusikan kesimpulan

bahwa total Realisasi Kantor Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan untuk Tahun Dana 2018-2020 dinyatakan sangat efektif.

5.2. Saran

1. Sebaiknya Kantor Dinas Pendidikan mempertahankan sistem kinerja agar rencana dan anggaran Realisasi berjalan secara efektif dan efisien.
2. Dalam menganalisis rencana dan dana Realisasi dan belanja sebaiknya Kantor Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan akan juga menggunakan teknik analisis perbandinga.



DAFTAR PUSTAKA

2010. Peraturan Pemerintah No.71. Tentang Standar Akuntansi Pemerintah(SAP)
2003. Peraturan Pemerintah No.20. Pasal 49 Tahun 2003 Tentang anggaran dana pendidikan
2003. Undang-Undang Republik Indonesia No.20. Pasal 4 Tahun 2003 Tentang sistem pendidikan nasional
2005. Peraturan Pemerintah No.58. Tentang penyusunan anggaran pendapatan dan belanja(APBD)
2005. Peraturan Pemerintah Pasal 31 UUD 1945 Tentang besarnya dana Pendidikan
2003. Peraturan Pemerintah Pasal 49 UU 1945 No.20. Tahun 2003 Tentang Alokasi Dana Disektor Pendidikan
2004. Undang-Undang No.33. Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah
2002. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.544/KMK.07/2002 Tentang dana Alokasi khusus (DAK) bidang pendidikan
2009. Peraturan Menteri Keuangan No.84/PMK.07/2009. Tentang alokasi belanja fungsi pendidikan
2009. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang laporan realisasi anggaran
- A. Indah Nurfadilah, 2018 Analisis Laporan Realisasi Anggaran Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bone. https://digilibadmin.unismuh.ac.id/upload/4875-Full_Text.pdf. Diakses pada 3 Maret 2021
- Anita Widiyana 2016, Analisis Efektivitas dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja Dalam Menilai Kinerja pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Palembang <http://repostroy.upalembang.id/id/eprint/1394/1/skripsi1191-1712094098.pdf>. Diakses pada 5 Maret
- Andyanto 2016, Pengaruh Perencanaan Anggaran dan Pengendalian Intern Terhadap Akuntabilitas Keuangan Daerah Invetering

(Kabupaten Kepulauan Selayar)
<http://repository.upalembang.ac.id/id/eprint/1394/1/skripsi191-1712094098.pdf> Diakses pada 7 Maret 2021

Dk Hastuti 2019, Realisasi Anggaran Dinas Dalduk
http://repository.stiewidyagamalumajang.ac.id/632/2/Bab%20%20_watermark.pdf. Diakses pada 7 Maret 2021

Muh Nur Abdi 2020, Analisis Perencanaan dan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja pada Kantor Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Prov Sul-Sel 2016-2018. Jurnal Vol.4 Nomor 1 februari 2020. <file:///C:/Users/HP/Downloads/garuda1704892.pdf> - Bing. Diakses pada 1 Maret2021

Rr Permana 2015, Anggaran Sektor Publik
<https://repository.widyatama.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/5678/Bab%20.pdf?sequence=10>. Di akses pada 8 Mater 2021

R.Silvy 2020, Anggaran Belanja Pemerintah Aceh yang Efektif dan Efesiensi.
muha.ac.id/xmlui/bitstream/handle/http://repository.un123456789/65 Diakses pada 8 Maret 2021

Wilisauliaa 2020, Analisis Perencanaan Anggaran dan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Malang tahun 2016-2018. E-JRA Vol.09 No. 05 Agustus 2020 [file:///C:/Users/HP/Downloads/8059-21868-1PB%20\(2\).pd](file:///C:/Users/HP/Downloads/8059-21868-1PB%20(2).pd)



LAMPIRAN

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASME
NOMOR : A. /FEB/UNIBOS/VIII/ 2021

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa :

Nama	: Suhartini
Stambuk	: 4517012085
Fakultas / Jurusan	: Ekonomi Dan Bisnis / Manajemen

Dinyatakan bebas dari **Plagiasme dengan batas maximal 30 %**, dengan rincian skripsi 24% dan Jurnal 23%, yang berhubungan skripsi dengan judul:

"Analisis Rencana Dan Realisasi Anggaran Pada Kantor Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan".

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Makassar, 24 Agustus 2021



Dr. H. A. Arifuddin Mane, SE., SH., M.Si., M.H.
NIDN 09.07077003

FORMULIR PENGAJUAN PENERBITAN

Nama Lengkap : Suhartini
Stambuk : 4517012085
Alamat : BTP Blok J No.91
Telpon/HP : 083133224660
E-mail : suhartini9143@gmail.com
Judul :

"Analisis Rencana Dan Realisasi Anggaran Pada Kantor Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan".

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benar bahwa:

1. Naskah yang diserahkan adalah karya asli dan bebas dari fabrikasi, plagiasi, duplikasi dan pelanggaran hak cipta data/isi.
2. Naskah belum pernah diterbitkan dan tidak sedang dipertimbangkan oleh penerbit lain
3. Apabila dikemudian hari ada implikasi terhadap hal-hal yang disebutkandi atas, bukan menjadi tanggung jawab Penerbit dan Dewan Editor.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan jujur dan bertanggung jawab,

Makassar, 24 Agustus 2021



Suhartini



UNIVERSITAS BOSOWA

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jalan Urip Sumoharjo Km. 4 Gd. 1 Lt. 6, Makassar-Sulawesi Selatan 90231

Telp. 0411 452 901 – 452 789 Ext. 125, Faks. 0411 424 568

<http://www.universitashosowa.ac.id>

Nomor : A. 38g /FEB/UNIBOS/II/2021
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Melakukan Penelitian

Kepada Yth

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Sulawesi Selatan

Di -
Tempat

Disampaikan dengan hormat, bahwa mahasiswa Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Universitas Bosowa Makassar :

Nama : Subartini
NIM : 45 17 012 085
Program Studi : Manajemen Keuangan
No.Tlp/Hp : 083 133 224 660

Akan melakukan Penelitian dengan Judul :

**"Analisis Rencana dan Realisasi Anggaran pada Dinas Pendidikan
Provinsi Sulawesi Selatan"**

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kami mohon kesediaan Bapak/Ibu
untuk menerima/mengizinkan mahasiswa tersebut melakukan penelitian di
Perusahaan Instansi/Lembaga/Organisasi yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian surat kami, atas bantuan yang diberikan, diucapkan terima kasih

Makassar, 29 Maret 2021

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis



Dr. H. A. Arifuddin Mane, SE., SH., M.Si., MH.
NIDN. 09 0707 7003

Tembusan :

1. Rektor Universitas Bosowa
2. Arsip



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN

Nomor : 12878/S.01/PTSP/2021
Lampiran :
Perihal : **Izin Penelitian**

Kepada Yth.
Kepala Dinas Pendidikan Prov. Sulsel

di-
Tempat

Berdasarkan surat Dekan Fak. Ekonomi dan Bisnis Univ. Bosowa Makassar Nomor : A-389/FEB/UNIBOS/III/2021 tanggal 29 Maret 2021 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

Nama : **SUHARTINI**
Nomor Pokok : 4517012085
Program Studi : Manajemen Keuangan
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa(S1)
Alamat : Jl. Urip Sumoharjo Km. 04, Makassar

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka penyusunan Skripsi, dengan judul :

**" ANALISIS RENCANA DAN REALISASI ANGGARAN PADA KANTOR DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI SULAWESI SELATAN "**

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **01 April s/d 30 Juni 2021**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami **menyetujui** kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik dan Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan menggunakan **barcode**,

Demikian surat izin penelitian ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
Pada tanggal : 01 April 2021

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN
Selaku Administrator Pelayanan Perizinan Terpadu

Dr. JAYADIN SAS, S.Sos., M.Si
Pangkat : Pembina Tk.I
Nip : 19710501 199803 1 004

Tembusan Yth
1. Dekan Fak. Ekonomi dan Bisnis Univ. Bosowa Makassar di Makassar;
2. *Pertinggal*.

SIMAP PTSP 01-04-2021



Jl. Bougainville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
Website : <http://simap.sulselprov.go.id> Email : ptsp@sulselprov.go.id
Makassar 90231



**DAFTAR REALISASI ANGGARAN PERTAHUN
DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SULAWESI SELATAN**

NO.	TAHUN	URAIAN	PAGU	REALISASI	(%)	SISA	KETERANGAN
1	2018	PENDAPATAN	145,860,000.00	1,662,277,069.60	1,139.64	1,516,417,069.60	
		BELANJA	2,579,455,152,852.42	2,519,744,926,642.00	97.69	59,710,226,210.42	
		BELANJA TIDAK LANGSUNG	1,894,692,298,330.00	1,862,701,309,602.00	98.31	31,990,988,728.00	
		BELANJA LANGSUNG	684,762,854,522.42	657,043,617,040.00	95.95	27,719,237,482.42	
2	2019	PENDAPATAN	268,845,000.00	997,399,169.80	370.99	728,554,169.80	
		BELANJA	2,624,917,540,846.05	2,591,982,623,125.00	98.75	32,934,917,721.05	
		BELANJA TIDAK LANGSUNG	1,917,439,951,354.05	1,893,856,911,750.00	98.77	23,583,039,604.05	
		BELANJA LANGSUNG	707,477,589,492.00	698,125,711,375.00	98.68	9,351,878,117.00	
3	2020	PENDAPATAN	301,800,000.00	809,885,195.40	268.35	508,085,195.40	
		BELANJA	2,699,275,327,038.90	2,075,138,603,378.00	76.88	624,136,723,660.90	
		BELANJA TIDAK LANGSUNG	1,845,253,795,439.30	1,773,848,533,778.00	96.13	71,405,261,661.30	
		BELANJA LANGSUNG	854,021,531,599.60	301,290,069,600.00	35.28	552,731,461,999.60	



A.n. Kepala Dinas Pendidikan Prov. Sulsel

Sekretaris

H. HERI SUMIHARTO, S.E., M.Ed.

NIP. 19680829 1989034 009